

24

B22

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2009

**JUDUL PENELITIAN**

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DENGAN  
BERWIRSAUSAHA (USAHA KECIL) DI PESISIR SELATAN  
YOGYAKARTA**



*Refleksi*

Oleh :

Mulyadi, M. Pd  
Dr. Ibnu Syamsi  
S.W Septiarti, M. Si

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
LEMBAGA PENELITIAN  
TAHUN 2009**

---

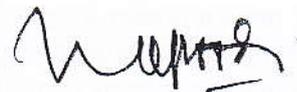
DIBIYAI OLEH DIVA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN  
NOMOR: 135/H34.21/PL STRANAS/2009 TANGGAL 6 APRIL 2009

**LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN  
STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009**

Judul Penelitian	: Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan Berwirausaha (usaha Kecil) Di Pesisir Selatan Yogyakarta
1. Bidang Penelitian	: Pendidikan
2. Lokasi Penelitian	: Propinsi DIY
3. Waktu Penelitian	: Maret – Oktober 2009
4. Kepala Proyek Penelitian Nama Lengkap dan Gelar Pangkat, Golongan Jabatan Jurusan/Program Studi Fakultas/Lembaga	: Mulyadi, M.Pd. : Pembina / IV A : Lektor Kepala : Pendidikan Luar Sekolah : Fakultas Ilmu Pendidikan
5. Jumlah Anggota Peneliti	: 2 orang
6. Alamat Kantor	: Universitas Negeri Yogyakarta, Karang Malang : 0274-586168 psw 369 : mulyadi_kajur@yahoo.co.id : Doangan RT 02/RW 16 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta
IP	: 0274-621575 : Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Yogyakarta, 30 November 2009

Ketua Tim Peneliti,

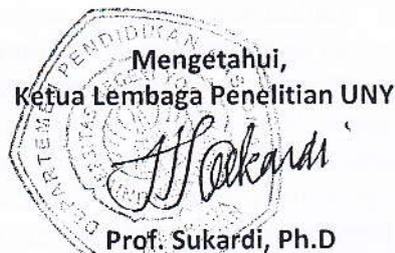


Mulyadi, M.Pd  
NIP 19491226 198103 1 001



Mengetahui,  
Dekan FIP UNY

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum.  
NIP 19550205 198103 1 004



Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian UNY

Prof. Sukardi, Ph.D  
NIP 19530519 1978 1 001

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DENGAN  
BERWIRAUUSAHA (USAHA KECIL)  
DI DAERAH PESISIR SELATAN YOGYAKARTA**

**ABSTRAK**

Oleh:

Mulyadi, Ibnu Syamsi dan S.Wisni Septiarti

Penelitian ini bertujuan menemukan model pemberdayaan masyarakat miskin dengan berwirausaha di wilayah pesisir selatan Yogyakarta melalui: (1) Analisis masalah dan potensi masyarakat pada 3 desa masing-masing di desa Girikerto Kabupaten Gunung Kidul, Desa Poncosari Kabupaten Bantul dan Banaran, Kabupaten Kulon Progo; (2) Mengidentifikasi kebutuhan belajar dan potensi masyarakat; (3) Mengembangkan model pemberdayaan non fisik sesuai tipologi desa untuk pengembangan kemampuan berwirausaha dalam skala kecil.

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahun anggaran dengan menggunakan pendekatan *research* dan *development*. Target tahun pertama adalah: (1) identifikasi masalah dan potensi masyarakat melalui teknik observasi langsung, dokumentasi, wawancara. Dokumentasi dimaksudkan sebagai data-data sekunder mengenai dinamika masyarakat dan juga memperoleh data-data yang berupa visual proses penelitian ini berlangsung. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi data-data tentang potensi dan masalah; (2) identifikasi kebutuhan belajar dan pengembangan potensi melalui FGD; (3) menemukan 5 orang pendamping di masing-masing desa dan (4) menyusun panduan pemberdayaan secara sederhana. Panduan ini digunakan sebagai awal implementasi model pemberdayaan di tahun kedua. Ke tiga desa dipilih dengan beberapa pertimbangan antara lain memiliki karakteristik sebagai masyarakat pesisir sebagaimana referensi yang digunakan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diinterpretasikan berdasarkan hasil FGD.

Penelitian tahun pertama ini menemukan potensi dari ke tiga desa, pada umumnya memiliki tipologi masyarakat pesisir namun hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua penduduk memilih pantai dan dinamikanya sebagai bagian dari aktivitas usaha melainkan bidang pertanian masih diandalkan sebagai bagian kehidupan utamanya. Melalui FGD di desa Banaran dan Girikerto diketahui bahwa kondisi tersebut, diakibatkan oleh pandangan masyarakat bahwa bidang pertanian yang sudah turun temurun lebih menjanjikan dari pada pantai yang cenderung beresiko lebih tinggi. Penjelasan ini tidak seluruhnya benar karena di desa Poncosari berdasarkan analisis kebutuhan belajar sebagian besar masyarakat memiliki keinginan tinggi untuk bisa berpartisipasi dalam bidang ekonomi di sekitar pantai. Namun demikian masih terdapat sebagian kelompok masyarakat di pesisir selatan yang pernah dan sedang mengembangkan usaha kecil sebagai hasil pendidikan dan pelatihan yang diperoleh sebelumnya, akan tetapi belum berkembang. Setelah melalui beberapa kali FGD, sebagian masyarakat di tiga desa penelitian kembali menyadari pentingnya pengembangan potensi dengan berwirausaha (usaha kecil).

*Key Word: Tipologi Masyarakat Pesisir Selatan, Pemberdayaan Non Fisik*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata pengantar	iv
Daftar isi	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Fenomena kemiskinan	8
B. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pesisir Melalui Berwirausaha	13
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	23
A. Tujuan Penelitian	23
B. Urgensi Penelitian	23
BAB IV METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Langkah-langkah Penelitian	25
B. Subyek Penelitian dan Lokasi	29
C. Analisis Potensi dan Masalah	30
BAB V HASIL PENELITIAN	31
A. Profil Tipologi Masyarakat Desa Girikarto, Poncosari dan Banaran Di Wilayah Pesisir Selatan DIY	31
1. Desa Girikerto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul	34
2. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul	39
3. Desa Banaran Kecamatan Galur Kulon Progo	43
B. Hasil Penelitian Tentang Analisis Potensi dan Masalah	44
C. Panduan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sebagai Produk Model Pemberdayaan	56
BAB VI KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin	17
Gambar 2. Alur Penelitian dan Pengembangan Model	27
Gambar 3. Langkah-langkah Pelaksanaan Pemberdayaan	29
Gambar 4. Peta Kecamatan Galur	43
Gambar 5. Skematik Langkah-langkah Atau Strategi Pemberdayaan	47

## BAB I PENDAHULUAN

Enam puluh empat tahun bangsa Indonesia pada tahun 2009 ini sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat atas negerinya sendiri, selama sekian tahun itu pula perjalanan sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa mengalami berbagai dinamika. Dinamisasi proses dan perubahan masyarakat tidak lepas dari pengaruh bangsa lain yang berdampak baik secara positif dan negatif bagi kehidupan bangsa yang sudah mengglobal ini. Salah satu fenomena sosial yang sejak tahun 80 an muncul kepermukaan adalah kemiskinan hingga terpetakanlah apa yang disebut sebagai kantong-kantong kemiskinan. Nampaknya usia sebuah bangsa yang besar bukan berarti bangsa tersebut lepas dari kemiskinan yang fenomenal, bukan saja dilihat dari jumlah atau tingkat kemiskinannya saja melainkan hingga menyentuh pada dimensi-dimensi lain yang lebih luas.

Kemiskinan sudah membuat jutaan anak tidak bisa menikmati pendidikan yang berkualitas, jutaan keluarga tidak bisa menikmati kehidupan yang layak. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh akses pendidikan. Artinya kemiskinan selain keterbelakangan, kebodohan serta problem sosial lain semakin kompleks, maka strategi yang digunakan untuk menanggulangi atau meminimasi problem-problem sosial tersebut memerlukan analisis yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Berdasarkan beberapa referensi baik dari hasil penelitian maupun berbagai kebijakan penanganan masalah kemiskinan dan problem sosial lain, masih memandang istilah kemiskinan didominasi oleh perspektif tunggal yaitu kemiskinan peralatan atau income poverty. Perspektif ini banyak dikritik oleh para ahli ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap. Pertama, kemiskinan seakan-akan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya

pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, jumlah orang miskin senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relatif di pedesaan maupun di perkotaan (Sudibyacto, KR. 16-12-2008). Melihat fenomena kemiskinan yang kompleks sebagaimana dimaknai berbagai ahli berarti sebenarnya kemiskinan merupakan masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Seolah-olah masalah ini tidak tertuntaskan padahal upaya pemerintah, kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan hingga perorangan telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah elemen. Bahkan disebutkan bahwa dimensi kemiskinanpun semakin kompleks seiring menurunnya kualitas hidup menyaoal akibat terpaan krisis ekonomi tahun 1997. Pada dasarnya belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan hingga periode pemerintahan kabinet bersatu jilid 2 ini, terbukti fenomena kemiskinan masih menjadi agenda program pembangunan periode 2009-2014.

Pada tahun 2005, Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) di Indonesia terdapat sekitar 35,10 juta. Kemudian menjadi 39,05 juta pada tahun 2006, yang artinya jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 3,95 juta pada tahun 2005-2006, pada bulan Maret 2008 sebesar 34,98 juta orang (15,42%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang (16,58%) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta orang. Selama periode Maret 2007 – Maret 2008 penduduk miskin di pedesaan berkurang 1,42 juta orang sementara perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Pada bulan Maret sebagian besar (63,47%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan (Berita Resmi Statistik No.37/07/Th.XI, 1 Juli 2008). Bisa diprediksi, bahwa jumlah tersebut akan kembali merangkak ke atas seiring dengan melonjaknya harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Bukan tanpa sebab apabila penanggulangan kemiskinan, kelaparan dan ketahanan pangan menjadi tujuan pertama yang hendak dicapai oleh tujuan pembangunan dunia pada umumnya (MDGs NEWS Edisi 01/Juli-September 2008).

Sebagai akibat perubahan iklim (climate change) sebagaimana analisis rentan wilayah pesisir menurut Sudibiyakto di halaman utama koran Kedaulatan Rakyat, 16 Desember 2008 disebutkan bahwa adalah terjadinya kenaikan muka air laut menjadi isu lingkungan yang memiliki dampak cukup tinggi terhadap kemiskinan khususnya pada wilayah-wilayah pemukiman yang relatif dekat dengan pantai atau pesisir selatan. Jika fenomena alam yang diramalkan oleh para ahli lingkungan ini benar, maka sebagian besar wilayah pesisir akan tergenang dan beberapa pulau kecil akan tenggelam. Padahal, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir cukup banyak dan kini mengalami ancaman kerusakan lingkungan.

Kasus penambangan pasir besi di pantai selatan Kulonprogo dan meningkatnya abrasi di pesisir Kabupaten Bantul dan sekitarnya, merupakan contoh betapa rentannya wilayah pesisir ini. Tingkat kerentanan yang tinggi dan ancaman atau potensi bencana alam yang kian meningkat, menjadikan wilayah pesisir mempunyai risiko kerusakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat mengkhawatirkan.

Wilayah Indonesia yang memiliki 17.504 pulau dan 95.181 km panjang garis pantai. Namun wilayah pesisir ini mempunyai problem dalam konteks pengelolaan ekosistem pesisir. Ada sekitar 140 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang mana 80% masyarakat pesisir masih miskin, dengan tingkat pendidikan rendah. Tingkat kerusakan lingkungan sangat tinggi, 72% kerusakan terumbu karang, 40% hutan mangrove telah rusak, pencemaran oleh industri dan limbah industri dan ancaman terhadap berbagai jenis bencana alam dan bencana akibat ulah manusia.

Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang dibatasi oleh wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut dan 12 mil ke arah laut. Di wilayah pesisir umumnya pemanfaatan sumberdaya alamnya tidak lestari, sehingga mengancam ekosistemnya. Jika kita menengok wilayah pesisir Propinsi DIY dan Jawa Tengah, maka di wilayah ini ancamannya berupa gempa bumi dangkal (jika episentrumnya kurang dari 60 atau 100 km) yang berpotensi menimbulkan tsunami, kenaikan

paras muka air laut (rising sea level) akibat pemanasan global, abrasi, erosi, banjir dan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai, sehingga berpotensi banjir di dataran rendah. Konsep manajemen risiko bencana telah disepakati bersama, bahkan telah disusun program-program aksi pengurangan risiko bencana di daerah yang rawan bencana. Dasar hukum yang memayungi juga cukup, antara lain UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Beberapa peraturan pemerintah (PP) dan permennya bahkan perda juga mulai dibuat, masalahnya adalah bagaimana political will dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelamatkan penduduk dari ancaman bencana sangat penting.

Kemiskinan apapun penyebabnya sampai saat ini masih menjadi problem klasik yang sulit dipecahkan. Bahkan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan pemerintah termasuk dengan menggunakan model Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai belum efektif, karena hanya memberikan solusi sesaat. Akibatnya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas. "Kemiskinan tidak akan pernah bisa dientaskan selama pemerintah masih menggunakan model yang sama untuk menyelesaikan persoalan. Sebab persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan (dientikan) dengan cara instan. Ini terkait dengan struktur ketenagakerjaan. Saya khawatir jika pengentasan kemiskinan tanpa diimbangi perbaikan struktur ketenagakerjaan nantinya hanya sekedar proyek yang menjadi solusi sesaat bagi masyarakat,".

Persoalan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi problem serius bagi bangsa Indonesia tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas jika masyarakat tidak dilatih mandiri. Akibatnya bantuan yang sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin tidak akan banyak berarti. Menurutnya, problem yang paling serius dalam tahun 2008 adalah persoalan yang terkait dengan demokrasi. Hal itu terjadi karena

penegakan hukum di Indonesia masih lemah, sehingga proses demokrasi justru sering berujung pada konflik. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa penanganan korupsi di Indonesia sudah mengalami peningkatan, namun belum bisa dikatakan optimal. Untuk mengatasi persoalan itu mau tidak mau pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan pencegahan korupsi di semua lini (tidak hanya sipil).

BPS dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional selama ini menggunakan ukuran kemiskinan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup akan pangan (beras) dan non pangan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Masalah kemiskinan seakan-akan hanya dapat diselesaikan dengan distribusi komoditi beras seperti program beras miskin (raskin). Konsep kuantitatif untuk mengukur kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini memunculkan semakin bertambahnya penduduk miskin karena semua orang lalu menjadi mau dengan gratis menerima bantuan dari pemerintah (ketergantungan, menunggu bantuan) dan hal ini berakibat pada pendefinisian kemiskinan secara kultural. Akibat lain banyak penduduk yang tidak dapat mengakses bantuan raskin atau program pemberantasan kemiskinan ini karena tidak tercatat, teridentifikasi dengan ukuran pemenuhan kebutuhan pangan atau beras. Sebagaimana diberitakan dimedia cetak, misalnya juga cukup banyak penduduk yang berada di pedesaan yang tidak tercatat dalam data kemiskinan. Kondisi ini pula yang membawa pemerintah kepada masalah yang semakin rumit, misalnya semakin tidak akuratnya data kemiskinan sesungguhnya dan hal ini sangat mengganggu program pembangunan yang hendak diterapkan. Bahkan supaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan bisa optimal, saat ini pemerintah sengaja membuat 3 strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi pertama dengan bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran yaitu 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Di antaranya disalurkan lewat Raskin PKH, BOS, Jamkesmas dan lain-lain. Termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta Rumah Tangga Sangat Miskin. Kedua lewat pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam PNPM yang difokuskan di 5.720 Kecamatan dengan bentuk

bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 3 Miliar/Kecamatan/Tahun. Ketiga dengan cara pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) yang sasaran utamanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil.

Saat ini sebagaimana propinsi-propinsi lain di Indonesia, DIY juga melalui pemerintah kabupaten/kota sedang menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Program ini merupakan kelanjutan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2PK. Program yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, ekonomi dan sarana prasarana ini (fisik) secara proporsional. Namun penyelenggaraan kedua program tersebut seringkali menghadapi hambatan atau kelemahan antara lain pertama, karena sifat bantuan atau hibah ini langsung ke desa (mungkin tidak melalui kecamatan) maka rasa memiliki, mengawasi atau melakukan pembinaan/pendampingan menjadi tidak berjalan dengan baik. Kedua, program pemberdayaan tersebut seringkali tidak memperhatikan program-program atau kegiatan yang sudah ada, maka seolah-oleh desa tinggal menerima program dan melaksanakan kegiatan saja sehingga dipersepsikan masyarakat sebagai top down atau tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapisan terbawah. Ketiga, program-program pemberdayaan terdahulu dan juga PNPM saat ini lebih banyak didominasi oleh pembangunan fisik. Pembangunan fisik memang penting sebagai *entry point* akan tetapi pengembangan non fisik tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Oleh karena itu kesenjangan sosial ekonomi yang ada hingga terjadinya kemiskinan atas kebijakan-kebijakan yang muncul ini nampaknya perlu diatasi oleh berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat itu sendiri, perusahaan-perusahaan atau bahkan perguruan tinggi. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan tahun 2008, model pengembangan masyarakat melalui kolaborasi antar lembaga-lembaga yang ada di masyarakat secara terintegratif ini lah yang akan dirintis dalam kegiatan penelitian ini dengan beberapa tahapan yakni keberpihakannya pada masyarakat miskin agar akses terhadap pelayanan dasar serta menggunakan modal sosial berupa kelembagaan (tradisional) sebagai sarana pengembangan model kolaborasi

dan integrative dalam aspek pemberdayaan ini. Seperti yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 khususnya bab 15 telah ditetapkan kebijakan pembangunan yaitu: (1).. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; (2). mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (3). menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; (4). meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dan (5). membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Arah kebijakan pembangunan ini disinergikan dengan sasaran penanggulangan kemiskinan tahun 2008 yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga diharapkan angka kemiskinan menurun menjadi 15,0 – 16,8 persen.

Dalam konsep sosiologis dan pemberdayaan masyarakat, kondisi miskin yang terjadi dalam masyarakat terlebih pada negara berkembang dapat dijelaskan adanya kebijakan yang diterapkan menyebabkan ketidakmampuan sebagian penduduk mengalami kesenjangan dalam mencapai kehidupan yang layak pada masyarakat yang dinamis. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok yang terjebak dalam kemiskinan struktural (*poverty trap*), deprivasi (*social deprivation*), isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*), dan ketiadaan akses pada sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan lain (Chambers, 1983). Oleh karena itu penelitian ini cenderung tidak menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai ukurannya dalam menggambarkan fenomena kemiskinan dan model pemberdayaannya melainkan lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif sebagai bagian dari model pemecahan masalah kemiskinan dengan menggunakan pendekatan *research and develelopment* untuk pengembangan model pemberdayaan khususnya melalui berwirausaha. Pengembangan model dan implementasi model pemberdayaan yang hendak dicapai melalui penelitian ini menunjukkan kepedulian perguruan tinggi terhadap fenomena kemiskinan dan pemberdayaan sebagai pendekatan terutama melalui pendidikan kewirausahaan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Fenomena Kemiskinan

Kemiskinan sebagai fenomena sosial disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Darwin Muhadjir (2001) terdapat empat faktor penyebab kemiskinan, *pertama*, faktor budaya, dimana penjelasan mengapa miskin tidak dicari dari luar, melainkan dari dalam diri orang atau masyarakat miskin sendiri sebagai pihak yang tertuduh sebagai penyebabnya. Budaya hidup miskin dianggap sebagai produk sosial kolektif, yang pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang kondusif di mana individu larut atau tidak berdaya di dalamnya, karena memang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.

*Kedua*, faktor struktural, di mana orang atau kelompok masyarakat miskin lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan negara yang bukan saja tidak menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Kemiskinan struktural juga dapat merupakan produk dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang hegemonis dan eksploitatif. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali bisa memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir elit ekonomi.

*Ketiga*, faktor alam. Setidaknya tiga jenis yang tergolong sebagai penyebab yang alamiah ini, yaitu: pertama, kondisi alam yang kering, tandus dan tidak memiliki sumber alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, serta keterisolasian wilayah pemukiman penduduk; kedua, bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit baik menyerang manusia maupun sumber mata pencaharian penduduk (seperti menyerang hewan ternak dan tanaman penduduk); dan ketiga, kondisi fisik manusia baik berupa bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi yang menjadikan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara layak.

*Keempat*, konflik sosial politik atau perang. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya produktifitas masyarakat, larinya modal dan akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran. Konflik vertikal dan horizontal berdampak pada terjadinya mobilitas paksa, perubahan tempat tinggal secara paksa, termasuk kehilangan lapangan kerja, harta benda, tanah, rumah atau tempat tinggal. Dengan mengacu pada pendapat Darwin, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di sebuah kawasan memiliki karakter yang berbeda dengan kemiskinan di kawasan yang lain.

Selanjutnya terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi tentang kemiskinan, yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standart kehidupan, sedangkan pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya. Seperti diungkapkan oleh Joseph F. Stepnek, ed. (1985) bahwa pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga. Seperti BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Sedangkan pendekatan pendapatan, melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Demikian pula pendekatan kemampuan dasar yang menilai bahwa kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan lainnya, pendekatan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Keberadaan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK, dokumen 2005) merupakan sebuah langkah maju pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. SNPK menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang kemiskinan. Apabila sebelumnya kemiskinan dipandang secara parsial sebagai kondisi kekurangan (pangan, pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar) maka kini pandangan mengenai kemiskinan mulai lebih komprehensif dan multidimensional. Setidaknya perubahan paradigma tersebut tercantum dalam dokumen formal pemerintah.

Sementara itu, di DIY sebagaimana wilayah-wilayah lain juga tidak lepas dari fenomena kemiskinan dan juga pengangguran. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) menunjukkan bahwa tingkat

pengangguran di propinsi DIY pada agustus 2008 sebesar 5,38 atau sebesar 108 ribu orang. Kedua fenomena tersebut juga melanda wilayah-wilayah miskin dan diantaranya adalah pesisir selatan di kabupaten yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY, Hendarto Budiyo, SMI, MM saat menyampaikan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY kepada peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Pengurangan Pengangguran di Provinsi DIY siang hari ini (Sabtu, 5/5) di Ruang Rapat Wakil Gubernur DIY, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Pada saat itu digambarkan bahwa jumlah pengangguran di DIY pada tahun 2006, sebanyak 151.570 orang, paling banyak ada di Kab. Sleman sekitar 28,80%, disusul Kab. Bantul (25,92%), Kota Yogyakarta (22,70%), Kab. Gunungkidul (13,07%), dan terendah Kab. Kulonprogo (9,49%). Para penganggur dengan berlatar belakang pendidikan mulai tidak tamat SD hingga perguruan tinggi ini sebagian besar berada di perkotaan (64,7 %) dan berusia potensial 20-24 tahun (28,44%), dan yang tidak potensial (24,48%). Penganggur terbuka laki-laki lebih besar daripada perempuan yaitu 51,71%, dan perempuan 48,29%. Sementara perkiraan kesempatan kerja di berbagai sektor, tahun 2006 sebesar 1.747.415 orang, tahun 2007 ada 1.786.274 orang dan tahun 2008 diproyeksikan ada 1.826.107 orang. Kesempatan kerja tambahan dari tahun 2005 sampai dengan 2008 sebanyak 115.715 orang.

Kondisi wilayah secara sosial ekonomi di DIY sangat dipengaruhi oleh potensi alam, sumber daya dan akses terhadap program pemberdayaan yang sedang diselenggarakan. Di wilayah-wilayah terpencil memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi karena selain wilayahnya jauh dari pusat kota atau kabupaten, juga rentannya wilayah-wilayah tersebut terhadap bahaya gempa, longsor, kekeringan atau juga tidak bersahabatnya cuaca di sekitar pesisir. Pengembangan wilayah-wilayah tertentu di DIY sering terhalang oleh kondisi infrastruktur atau jika infrastruktur sudah terpenuhi, namun pemanfaatannya belum optimal bagi pengembangan struktur ekonomi pedesaan.

Secara konsep Wilayah Pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang dibatasi oleh wilayah kecamatan yang berbatasan dengan laut dari 12 mil ke arah laut. Wilayah pesisir di Indonesia terbagi dua yaitu wilayah pesisir utara dan selatan. Wilayah pesisir utara dikenal sebagai pusat perekonomian dan perdagangan, maka pesisir selatan lebih dikenal sebagai kawasan terisolir dari hubungan luar serta kondisi alam yang kurang potensial. Umumnya wilayah pesisir ini sebagian besar adalah pedesaan yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Di wilayah pesisir hingga saat tinggal sekitar 140 juta penduduk dengan 80% nya masih dikategorikan sebagai miskin dan dengan tingkat pendidikan yang rendah serta umumnya pemanfaatan sumberdaya alamnya tidak lestari, sehingga mengancam ekosistemnya. Jika kita menengok wilayah pesisir Propinsi DIY dan Jawa Tengah, maka di wilayah ini ancamannya berupa gempa bumi dangkal (jika episentrumnya kurang dari 60 atau 100 km) yang berpotensi menimbulkan tsunami, kenaikan paras muka air laut (*rising sea level*) akibat pemanasan global, abrasi, erosi, banjir dan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai, sehingga berpotensi banjir di dataran rendah.

Kasus penambangan pasir besi di pantai selatan Kulonprogo dan meningkatnya abrasi di pesisir Kabupaten Bantul dan sekitarnya, merupakan contoh betapa rentannya wilayah pesisir ini. Tingkat kerentanan yang tinggi dan ancaman atau potensi bencana alam yang kian meningkat, menjadikan wilayah pesisir mempunyai risiko kerusakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi wilayah yang rentan terhadap kemiskinan yang dimensional pada satu sisi memberi pemahaman bahwa sumber daya alam yang sangat banyak belum tentu memberi peluang usaha yang memadai manakala kemampuan untuk mengelolanya tidak optimal. Pada sisi yang lain kemiskinan yang melanda beberapa wilayah pesisir selatan kekayaan laut dengan hayatinya yang begitu banyak meningkatkan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk selalu menjaga kelestarian alamnya sehingga alampun menjadi bersinergi dengan peluang-peluang usaha yang ada.

Oleh karena itu kesadaran diri dan masyarakat ini lah yang dalam kerangka pemberdayaan masyarakat terus diupayakan berkembang dalam setiap individu yang bermukim di sekitar pesisir selatan bahwa melakukan usaha-usaha produktif yang sinergis dengan konservasi dan kelestarian alam akan berdampak pada terbangunnya kualitas hidup dan kehidupan secara komprehensif. Pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat untuk mandiri melalui pembelajaran kewirausahaan diharapkan meneruskan atau mempertahankan usaha-usaha kecil sesuai kebutuhan. Melalui penelitian dengan pendekatan Konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Wardani dan Haryadi (dalam Jurnal Alni, 2004:87) merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat (miskin) agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya, permodalan, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas dan kesadaran menuju masyarakat yang mandiri. Beberapa peraturan pemerintah (PP) dan permennya bahkan perda juga mulai dibuat, masalahnya adalah bagaimana political will dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelamatkan penduduk dari ancaman bencana sangat penting.

#### **B. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pesisir Melalui Berwirausaha**

Pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori Sumber daya manusia. Teori ekologik mengemukakan tentang "batas pertumbuhan". Untuk sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologik menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (*zero growth*) untuk produksi dan penduduk.

Teori Sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan. Teori sumber daya manusia diklasifikasikan kedalam teori yang menggunakan pendekatan yang fundamental. Pendekatan pemberdayaan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam segala segi. Bertolak dari pemberdayaan yang humanis ini maka dibutuhkan program-program pemberdayaan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79), inti dari pemberdayaan ada tiga hal, yaitu **pengembangan** (*enabling*), **memperkuat potensi** atau **daya** (*empowering*), dan **terciptanya kemandirian**. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi masyarakat tidak menyadari, atau bahkan belum diketahui. Oleh karena itu, daya harus digali, dan kemudian dikembangkan.

Berdasarkan asumsi tersebut maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian.

#### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian **berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut**. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya

kemampuan yang terdiri kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kondisi kognitif adalah kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu perilaku yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan untuk diintervensi dalam mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan.

Terjadinya keberdayaan dalam empat aspek tersebut akan memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan. Dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Yang diharapkan dari adanya pemberdayaan adalah untuk mewujudkan komunitas yang baik, masyarakat yang ideal. Menurut Montagu & Matson dalam Suprijatna ( Suprijatna, Tjahja, 2000:13) dalam *the Dumanization of Man*, yang mengusulkan konsep *The Good Community and Competency* yang meliputi sembilan konsep komunitas dan empat komponen kompetensi masyarakat. *The Good Community and Competency* adalah :

- 1) Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.
- 2) Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab.

- 3) Memiliki vialibilitas yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri.
- 4) Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendak.
- 5) Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.
- 6) Komunitas memberi makna kepada anggota.
- 7) Adanya heterogenitas dan beda pendapat.
- 8) Adanya konflik dan managing konflik.

Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut :

- 1) Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
- 2) Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.
- 3) Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
- 4) Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Pada awalnya upaya memberdayakan masyarakat pasti dihadapkan pada suatu kondisi masyarakat atau bagian dari masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Oleh karena itu untuk meningkatkan komunitas yaitu dengan 9 langkah konsep komunitas yang didukung dengan 4 kompetensi agar dapat mengantarkan masyarakat mampu untuk memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan sosial. Setiap program pemberdayaan masyarakat yang memiliki *bottom up approach* diawali oleh suatu tahap identifikasi masyarakat secara holistik yang meliputi aspek sosial kelembagaan, ekonomi, kapasitas serta masalah-masalah yang dihadapi sebagai langkah awal pembentukan penyadaran atas diri yang potensial untuk berkembang. Secara umum teori-teori kewirausahaan dalam kaitannya dengan aktivitas pemberdayaan, serta prinsip pemberdayaan dengan pendekatan pendidikan luar sekolah menyebutkan bahwa pemahaman terhadap konsep diri,

kesadaran diri menjadi awal bagi terlaksananya sebuah proses pemberdayaan menjadi prinsip yang paling utama. Model pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di wilayah pesisir selatan DIY adalah sebagai dijelaskan melalui gambar dan intepretasi di bawah ini :

Gambar 1. Model pemberdayaan masyarakat miskin



Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, dengan diawali oleh tahap penyadaran diri terhadap potensi diri akan pentingnya berperilaku usaha dengan mempertimbangkan kemampuan atau pengembangan keterampilan-keterampilan tertentu yang memang dipersyaratkan secara konsep.

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kesadaran tinggi.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Tahap pertama merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Pada tahap kedua masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Sehingga akan bertambah wawasan dan kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan.

Tahap ketiga adalah tahap pengayaan, peningkatan intelektualitas dan kecakapan ketrampilan yang diperlukan, agar mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Usaha/bisnis merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, usaha dijalankan juga untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan usaha, baik dalam jangka panjang ataupun dalam waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu sebuah usaha harus dikelola dengan baik.

Maka dalam konsepsi pemberdayaan masyarakat, mengawali pemberdayaan melalui kewirausahaan adalah hal yang penting dilakukan.

Hal ini untuk memberdayakan bidang-bidang yang lain setelah pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Karena pada masyarakat miskin, masalah utama adalah masalah perekonomian keluarga atau kampung yang menyebabkan mereka tidak berdaya baik secara sosial, kesehatan maupun politik. Pada masyarakat miskin konsentrasi tertinggi tertuju bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Mereka akan serius dan akan mengikuti secara penuh terhadap hal-hal yang terkait dengan perbaikan perekonomian. Kewirausahaan merupakan pilihan strategis terhadap pemberdayaan masyarakat miskin.

*Community development* juga bisa didefinisikan sebagai pemberdayaan, pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya. Keutuhan komunitas dipandang sebagai persekutuan hidup atas sekelompok manusia dengan karakteristik: terikat pada interaksi sosial, mempunyai rasa kebersamaan berdasarkan genealogis dan kepentingan bersama, bergabung dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan, menghormati hak dan tanggung jawab berdasarkan kepentingan bersama, memiliki kohesi sosial yang kuat, dan menempati lingkungan hidup yang terbatas.

Pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (*bottoming up approach*) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Dan dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial. Sebagaimana pemahaman-pemahaman lain, konsep dan implementasi pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi masyarakat untuk menemukenali permasalahan sendiri, mengatasi dengan program kerja yang sesuai dan mengatur penyelenggaraan untuk keberlanjutannya. Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap

orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya partisipasi ini dibedakan atas partisipasi kolektif dan partisipasi individu.

Menurut Ndraha (1987) bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui, yaitu:

(1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. Jadi masih dibutuhkan wadah untuk berpartisipasi di tingkat kelompok. Melalui wadah partisipasi tersebut anggota kelompok akan saling belajar melalui pendekatan "*learning by doing*" menuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Yang terjadi adalah adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang merupakan potensi untuk pembangunan.

Secara umum ada beberapa pendekatan dalam pengembangan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Pendekatan potensi lingkungan, hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada pada masyarakat setempat.
2. Pendekatan Kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap wilayah dalam arti kesesuaian dengan wilayahnya (desa/kota) terhadap hal yang akan dikembangkan.
3. Pendekatan kondisi fisik, lebih pada kondisi fisik manusianya.
4. Pendekatan ekonomi, hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Pendekatan politik.
6. Pendekatan Manajemen, Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada dalam masyarakat kemudian dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, *budgeting* dan *controlling*. Model pendekatan ini sebenarnya dapat dilakukan

dalam masyarakat yang bermacam-macam (pedesaan, perkotaan, marjinal, dan lain-lain).

7. Pendekatan sistem, pendekatan ini melibatkan semua unsur dalam masyarakat.

Sebagai gambaran secara sistematis, terintegrasi dan terarah, Pemerintah telah mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM juga merupakan instrumen program untuk percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015. Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Pemanfaat langsung PNPM adalah (1) kelompok masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan; (2) kelompok penganggur dan pencari kerja di pedesaan dan perkotaan; (3) kelembagaan masyarakat di pedesaan dan perkotaan; dan (4) kelembagaan pemerintahan lokal.

Pada tahun 2007 pelaksanaan PNPM inti menggunakan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk daerah pedesaan dan mekanisme Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk daerah perkotaan dengan jumlah lokasi sebanyak 1993 kecamatan di pedesaan dan 838 kecamatan di perkotaan. Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun. Pada tahun 2008, PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM inti diperluas melibatkan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), serta diperkuat oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh departemen sektor. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan PNPM. Bila melihat tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja

masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, maka pengelolaan program nasional di Indonesia khususnya PNPB Mandiri adalah Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan *Bertumpu pada pembangunan manusia. Otonomi; Desentralisasi; Berorientasi pada masyarakat miskin; Partisipasi; Kesetaraan dan keadilan gender; Demokratis. Transparansi dan Akuntabel; Prioritas dan Keberlanjutan.* Program-program pemberdayaan nasional memiliki prinsip pada

- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal,
- Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif,
- Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat,
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir,
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan.
- Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin di wilayah pesisir adalah bentuk keterlibatan secara lebih total dalam semua aspek yang menyangkut diri dan kehidupan mereka. Yakni sejak perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi serta perelevansiannya. Oleh karena itu prinsip pemberdayaan yang dikehendaki sebagaimana pemberdayaan di negara lain seperti Thailand khususnya pada masyarakat pesisir adalah *helping the poor to hel themselves* (BOBP, 1990)

### BAB III

#### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

##### A. Tujuan Penelitian

Penelitian yang direncanakan berjalan selama 2 tahun anggaran ini bertujuan:

*Pada tahun pertama:*

1. Menemukan gambaran (tipologi) masyarakat miskin pesisir selatan di 3 kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunung Kidul dalam karakteristik, permasalahan dan potensi yang diduga dapat dikembangkan dalam konteks pemberdayaan dengan berwirausaha.
2. Menemukan model pemberdayaan yang relevan dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat di tiga wilayah pesisir selatan tersebut beserta setidaknya 5 orang dari masing-masing desa di tiap kabupaten untuk menjadi pendamping dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan pada tahun ke dua.
3. Menghasilkan draft panduan pemberdayaan yang kontekstual pada masyarakat di pesisir selatan

Pada tahun kedua akan ditemukan dan dikembangkan di ketiga lokasi penelitian, berupa:

1. Implementasi model pemberdayaan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan.
2. Dilakukannya diseminasi hasil penelitian ke dalam penyusunan model pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa

##### B. Urgensi Penelitian Strategi Nasional

Melalui pendekatan reseach and development ini sebagai pendekatan utama dalam penelitian strategis nasional ini hendak mencoba berperan serta dalam menanggulangi kemiskinan terutama di sekitar pesisir selatan DIY khususnya di 3 kecamatan dari Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Keterlibatan Perguruan Tinggi yang antara lain melalui

kegiatan penelitian ini memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan pendidikan (non fisik) diasumsikan memiliki keunggulan seperti sifat investasi dari program atau kegiatan khususnya dalam hal penanaman jiwa kewirausahaan, kemampuan manajerial usaha produktif, keberlanjutan dan pendampingan, sehingga bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan berdasarkan penelitian nantinya dapat membantu masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya hidup lebih berkualitas, mandiri dalam mensikapi kehidupan yang penuh tantangan di sekitar pesisir selatan serta berani menambil resiko dalam berwirausaha.

Apabila di jelaskan melalui tahapan-tahapan kegiatan untuk terjadinya pengembnagan model pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berwirausaha ini keutamaan penelitian ini adalah:

1. Menemukan atau mengembangkan konsep pemberdayaan yang bersumber dari pemahaman masyarakat sendiri terutama akan kebutuhan belajar atau berusaha masyarakat pesisir khususnya di Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo.
2. Menemukan alternatif kebijakan yang sesuai kondisi spesifik ketiga lokasi penelitian untuk menanggulangi ketidakberdayaan pada tuntutan dan peluang pasar.
3. Menemukan bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menggunakan analisis potensi dan masalah untuk terbentuknya masyarakat yang sadar, mandiri dan aktif akan pentingnya mengembangkan diri melalui berwirausaha
4. Dari hasil *research and development* dan implementasi model pemberdayaan bagi masyarakat peisir selatan DIY hendak dikembangkan model kewirausahaan sebagai bentuk pengayaan kualitas materi ajar pendidikan kewirausahaan

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian mengenai model pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan melalui berwirausaha (skala kecil) ini menggunakan pendekatan *research and development*. Penelitian dengan jenis pendekatan ini memungkinkan penelitian berlangsung secara lebih bermakna karena proses dan hasil kegiatannya memiliki daya guna dan multi guna bagi pengembangan wilayah pesisir selatan khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraannya dengan berwirausaha. Penelitian dan pengembangan dalam garis besarnya mempunyai arti penting, yaitu penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*innovation*). Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan dinikmati oleh semua masyarakat tidak terlepas dari peranan penelitian dan pengembangan tersebut. Sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, dewasa ini telah terjadi pergeseran fokus manajemen dari O&M (*Organization and Management*) kepada R&D (*Research and Development*) sehingga penelitian dan pengembangan menempati posisi yang strategis dalam rangkaian kegiatan manajerial, dan keberadaan penelitian dan pengembangan semakin menjadi penting. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan dewasa ini sangat diperlukan, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

Peran penelitian dan pengembangan pada institusi pemerintah sudah sepatutnya didorong menjadi bagian penting dan mewarnai perumusan kebijakan, agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Sukmadinata (2006: 168) menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau penyempurnaan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah modul paket pelatihan kewirausahaan dan modul pembelajaran

kewirausahaan.

Sebagai gambaran bahwa penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 tahun yaitu tahun 2009 dan tahun 2010, dengan target yang berbeda. Pada tahun pertama yang diawali dengan survei untuk menggali berbagai hal yang berkaitan dengan data-data primer dan sekunder tentang tipologi masyarakat pesisir selatan direncanakan dapat menemukan model pemberdayaan masyarakat bagi penduduk pesisir selatan dari target ini panduan pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan menjadi salah satu produknya.

Kegiatan di atas diikuti dengan analisis kebutuhan belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang kewirausahaan maka sebagai targetnya akhirnya adalah sebuah disain pelatihan kewirausahaan hingga disain modul pembelajaran kewirausahaan bagi masyarakat pesisir selatan sebagai bentuk desiminasi hasil penelitian untuk bidang pengajaran.

Secara lengkap pendekatan research and development itu dilaksanakan melalui 10 langkah sebagaimana dikemukakan oleh Borg dan Gall (1989).

Sebagaimana berikut:

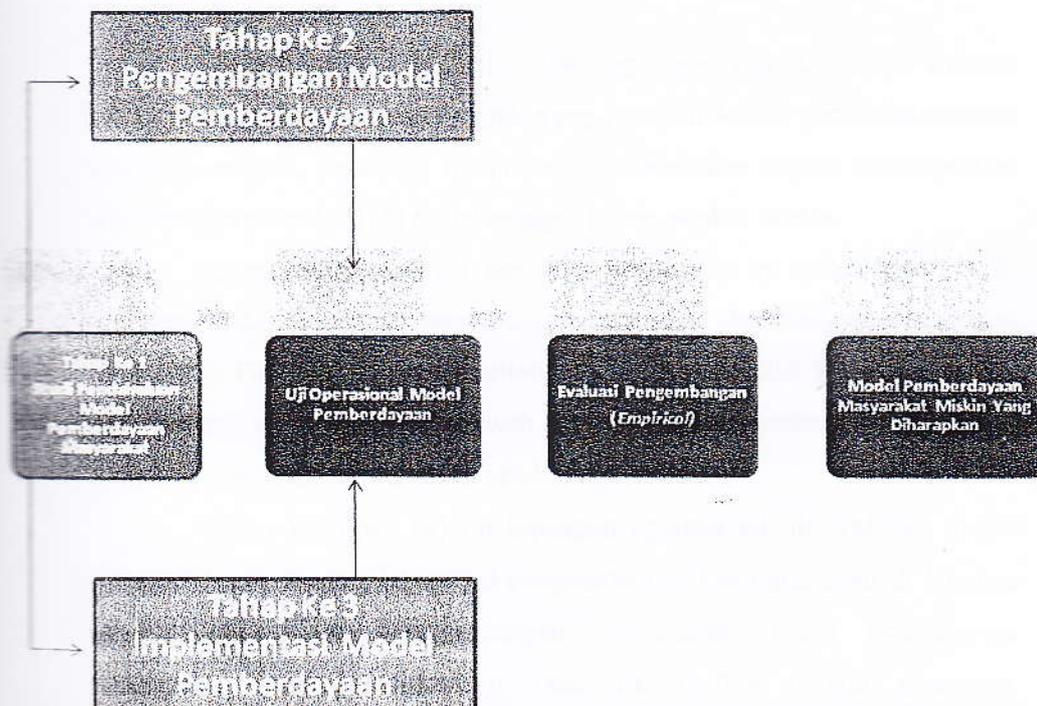
1. Penelitian dan pengumpulan informasi
2. Perencanaan (*planning*)
3. Mengembangkan produk awal
4. Ujicoba lapangan produk awal
5. Revisi produk utama
6. Uji lapangan utama dan diperluas
7. Penyempurnaan revisi produk operasional
8. Uji lapangan operasional
9. Revisi produk final
10. Deseminasi dan implementasi

Ke 10 langkah tersebut terbagi ke dalam empat tahap yaitu studi pendahuluan untuk pengembangan; pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin; implementasi pengembangan model pemberdayaan dan uji operasional model pemberdayaan.

Pada tahun pertama penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data atau informasi, serta merencanakan tindakan berdasarkan analisis masalah dan potensi untuk menemukan kebutuhan pemberdayaan, penyusunan bentuk pemberdayaan yang berorientasi pada pemberdayaan non fisik yaitu pendidikan kewirausahaan. Sebagai langkah awal pemberdayaan melalui penelitian dan pengembangan ini akan disusun pula panduan pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan. Panduan yang akan disusun meliputi beberapa tahap yang diawali dengan mengeksplorasi karakteristik masyarakat pesisir khususnya yang masih miskin akan tetapi memiliki kemauan untuk berwirausaha. Panduan yang disusun diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembang masyarakat dalam bidang apapun agar memperoleh pemahaman awal tentang hakekat, tujuan, relevansi pemberdayaan khususnya pada masyarakat miskin di wilayah pesisir selatan Yogyakarta.

Gambar 2.

#### Alur Penelitian & Pengembangan Model



Tahap pertama, dilakukan dengan melalui studi pendahuluan dengan (1) penelitian dan pengumpulan informasi atau data (*research and information collecting*) teori, hasil studi dan informasi yang relevan dengan masalah pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di sekitar pesisir selatan. Disamping itu langkah ini juga dilanjutkan dengan assesment kebutuhan, kajian pustaka, studi penelitian berskala kecil hingga pada (2) perencanaan (*planning*) dan penyusunan bentuk, sifat dan jenis kebutuhan belajar melalui pendidikan kewirausahaan serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan sebagai bentuk pengembangan model berwirausaha dengan terlebih dahulu melakukan validasi terhadap rancangan kegiatan pembelajaran kewirausahaan bersama dengan para ahli. (3) mengembangkan produk awal (*develop preliminary form of product*). Menyiapkan model pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan yang berbasis potensi, mengembangkan panduan pemberdayaan dengan pendidikan kewirausahaan sebagai materinya serta menyusun modul pengembangan kewirausahaan untuk masyarakat di pesisir selatan sebagai produk deseminasi untuk proses pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa.

Tahap kedua, (4) uji coba lapangan produk awal (modul kewirausahaan) di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi penelitian dengan sejumlah subyek, data-data interview, observasi dan angket dikumpulkan dan dianalisis untuk di (5) revisi sebagai bahan produk utama.

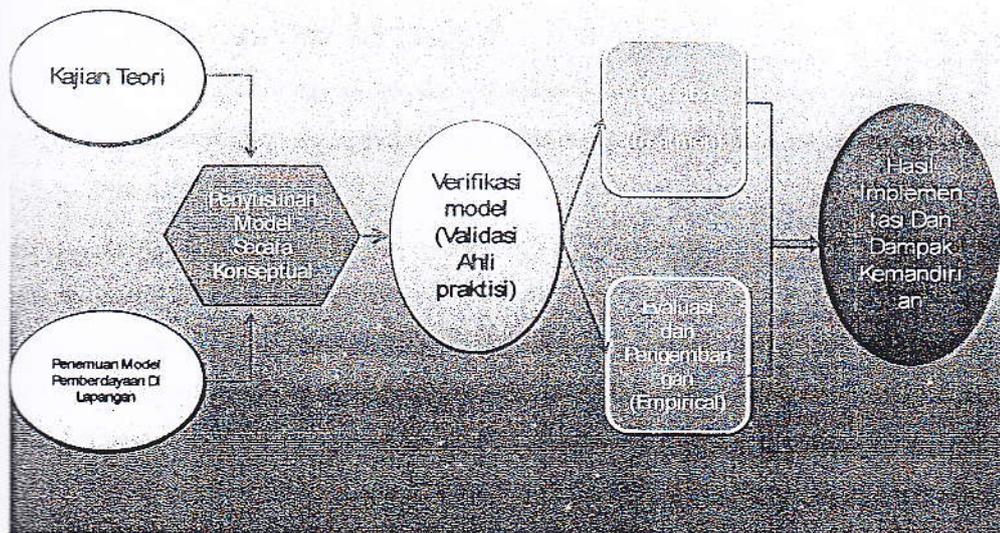
Tahap ketiga, (6) uji lapangan utama atau uji coba diperluas di beberapa wilayah pesisir yang belum terjangkau dan dengan masyarakat miskinnya. Data-data baik kuantitatif maupun kualitatif tentang aktivitas usaha masyarakat miskin di wilayah pesisir selatan dianalisis sebagai acuan untuk (7) penyempurnaan revisi produk operasional.

Tahap keempat, (8) uji lapangan operasional, uji validasi model pemberdayaan dan model modul pengembangan kewirausahaan di lakukan di wilayah pesisir selatan dengan masyarakat miskin sebagaimana ditetapkan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi,

wawancara, dokumentasi dan angket untuk dianalisis. (9) revisi produk final, merevisi produk terakhir sebagaimana disarankan hasil uji lapangan operasional, (10) deseminasi dan implementasi, melaporkan produk yang disampaikan melalui pertemuan profesional dan jurnal.

Gambar 3. Langkah-langkah Pelaksanaan Pemberdayaan

## Langkah-Langkah Pelaksanaan



### B. Subyek penelitian dan lokasi penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh penduduk miskin yang tinggal di daerah pesisir selatan terutama di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul dengan karakteristik yang dipersyaratkan terlebih dahulu. Data-data yang diakses juga diperkaya dengan informasi dari *key informan* yaitu para pimpinan formal dan non formal yang dipandang representatif dan memahami dinamika kehidupan masyarakat yang menjadi subyek penelitian ini. Para pimpinan termasuk lembaga-lembaga ekonomi tradisional yang berkembang di masyarakat ini yang pada saatnya diharapkan dapat membantu tim peneliti untuk melakukan implementasi

model pemberdayaan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan untuk modal berwirausaha (usaha kecil).

Data-data baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui *observasi*, *wawancara* termasuk didalamnya dengan menggunakan *FGD*, *dokumentasi* dan *kajian pustaka*. Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dalam setiap tahap proses langkah pelaksanaan penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif untuk diinterpretasikan sesuai jenis dan sifat data yang ada.

### C. Analisis Potensi dan Masalah

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin dalam penelitian strategi nasional ini didahului dengan cara penelitian sebagai berikut:

Survei, dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan langsung tentang kondisi fisik ke tiga desa yang menjadi setting penelitian beserta dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi masyarakat setempat. Survei yang dilakukan beberapa kali ini dilengkapi dengan data-data resmi yang berupa dokumen-dokumen keadaan demografi penduduk masing-masing desa. Secara keseluruhan kegiatan survei juga dilengkapi dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada para pemimpin formal di tingkat kecamatan dan desa khususnya bagian kesejahteraan dan unit pemberdayaan masyarakat.

Data-data yang diperoleh dari hasil survei, dokumentasi dan wawancara secara langsung perihal kondisi masyarakat baik geografis dan demografis kemudian dianalisis untuk diari formula pertemuan dengan para tokoh masyarakat lain dalam bentuk *FGD (Focus Group Discussion)*. *FGD* ini diperlukan untuk mempertajam temuan-temuan, masalah-masalah serta untuk memastikan prioritas-prioritas untuk pengembangan dan pemecahan atas masalah secara bersama.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Tipologi Masyarakat Desa Girikarto, Poncosari dan Banaran Di Wilayah Pesisir Selatan DIY

Dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan studi dokumen, penelitian ini diawali dengan menyajikan karakteristik wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Beberapa langkah telah dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data sebagaimana ditunjukkan dalam uraian di bawah ini.

Penelitian ini mengambil wilayah Pesisir Selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 3 Desa dari 3 Kabupaten yang ditengarai memiliki kedekatan wilayah dengan pesisir selatan Laut Jawa. Ketiga desa tersebut adalah di Girikerto, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul; Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dan Desa Banaran Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Dari ketiga desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian diambil masing-masing 3 pedukuhan. Pengambilan setting penelitian ini didasarkan atas pertimbangan:

1. Desa tersebut dianggap merupakan wilayah pesisir selatan sebagaimana dipilih sejak penelitian ini dirancang.
2. Desa tersebut dipandang memiliki wilayah-wilayah pedukuhan yang secara geografis relatif paling dekat dengan pantai pesisir selatan.
3. Ketiga desa memiliki karakteristik, potensi dan permasalahan yang berbeda-beda namun dipandang mampu dikembangkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat khususnya bidang kewirausahaan.
4. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat ke tiga desa dikategorikan sebagai desa yang relatif masih miskin.

Pantai pesisir selatan khususnya di daerah Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo memiliki kekhususan. Sebenarnya secara umum jalan lingkar selatan yang diharapkan dapat membuka wilayah agar memberi kemudahan

bagi masyarakat untuk berperilaku sosial ekonomi sebagaimana yang terjadi di pantai utara dengan berkembangnya sentra-sentra perdagangan, tidak demikian halnya dengan pantai pesisir selatan. Jalan lingkaran selatan belum sepenuhnya menjadi bagian dari infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dengan berkembangnya sentra perdagangan, ternyata berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana PNPM khususnya di Kecamatan Panggang Gunung Kidul belum mampu menunjukkan dampaknya secara signifikan. Meskipun sebenarnya beberapa wilayah saat ini melalui PNPM telah dirintis jalan tembus untuk menuju ke kawasan wisata pantai, namun juga belum tampak hasilnya oleh karena rintisan pengembangan infrastruktur ini masih dalam proses tahun 2008.

Penelitian pada tahun pertama ini ditujukan untuk melakukan identifikasi potensi di tiga desa wilayah pesisir selatan yaitu Girikerto, Kecamatan Panggang, Poncosari, Kecamatan Srandakan dan Banaran, Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo DIY. Dengan diawali survei terhadap lokasi-lokasi-lokasi tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa pada dasarnya wilayah-wilayah yang disebut pesisir selatan ini memiliki ciri-ciri yang relatif sama yakni letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, memiliki lahan yang relatif kering dengan penduduk yang sebagian besar adalah hidup dari tanah pertanian sementara kakayaan pesisirnya misalnya sebagai wilayah Jalur Lintas Selatan pada umumnya dipandang sebagai fasilitas jalan raya yang membuka peluang usaha lebih banyak lagi. Dampak pembangunan jalan lintas selatan di wilayah Gunung Kidul baru pada pemanfaatan jalan transportasi saja oleh karena pemukiman penduduk tidaklah berkembang dengan jalur lintas selatan sehingga peluang usaha belumlah tampak sebagaimana terjadi di Bantul dan juga Kulon Progo.

Di Bantul, jalur lintas selatan yang dibangun diikuti dengan pengembangan wilayah pemukiman, sehingga wilayah Bantul pada jalur lintas selatan menjadi terbuka, kegiatan usahapun menjadi berkembang, dan hal inilah yang menyebabkan harga tanah di sekitar jalur lintas selatan mengalami peningkatan. Demikian pula halnya dengan wilayah jalur lintas selatan yang

ada di sekitar desa Banaran, kegiatan usaha masyarakat semakin terbuka terhadap wilayah lain, transportasi menjadi semakin mudah, begitu pula kegiatan di sektor lain juga semakin tinggi kegiatannya.

Potensi wilayah pesisir selatan yang ditopang oleh pembangunan bidang kelautan dan jalur lintas selatan seakan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan deversifikasi usaha. Statemen tersebut tidak seluruhnya benar karena menurut hasil wawancara terhadap beberapa warga masyarakat yang memiliki peluang berusaha oleh karena pengembangan jalur lintas selatan tidak serta merta mengalami kemajuan berarti, pada masyarakat yang masing dikategorikan miskin ternyata tidak mampu mengikuti nilai usaha jalur lintas selatan karena ketidakmampuannya dalam hal pengadaan modal usaha ketika pembangunan jalan tersebut dilakukan. Selain itu masyarakat miskin lebih banyak menjadikan jalur lintas selatan ini sebagai kemudahan untuk melakukan mobilitas atau urbanisasi ke kota-kota lain.

Potensi kelautan di wilayah pesisir selatan di ketiga lokasi penelitian pernah dilakukan pengembangan-pengembangan secukupnya bukan hanya mengenai pembenahan pantai agar lebih nyaman bagi kunjungan wisata melainkan tersedianya peluang usaha di sekitar pantai pesisir selatan. Persoalannya adalah bahwa di sekitar pantai selatan dengan usaha kelautannya dipandang belum begitu banyak menjajikan oleh karena harus bekerja keras untuk kelangsungan hidup keluarga. Menurut catatan lapangan di sekitar pantai selatan khususnya Bantul dan Kulon Progo, wisata pantai akhir-akhir tahun ini memperoleh pembenahan-pembenahan untuk memperindah pantai yang dimiliki kedua kabupaten tersebut. Pembenahan yang disosialisasi sekaligus untuk meningkatkan motivasi masyarakat di sekitar untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha di seputar pantai pesisir laut, oleh karena sebagian pengusaha bidang kelautan tersebut adalah bukan dari penduduk sekitar melainkan datang dari beberapa kota di luar kedua kabupaten.

### 1. Desa Girikarto, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul

Kecamatan Panggang merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Gunungkidul yang berada kurang lebih 38 km barat daya Wonosari dengan batas wilayah :

- Utara : Kecamatan Playen dan Kecamatan Imogiri (Kabupaten Bantul)  
 Timur : Kecamatan Paliyan dan Saptosari  
 Selatan : Samudra Indonesia dan  
 Barat : Kecamatan Purwosari

Kecamatan Panggang mempunyai luas lahan 9.980,40 ha terdiri dari 30,61 ha (0,31 %) lahan sawah tadah hujan. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari :

1. Pekarangan / bangunan : 626,40 ha (6,28%)
2. Tegall/kebun : 6936,68 ha (69,50%)
3. Tambak/kolam : 2,00 ha (0,24%)
4. Hutan negara : 902,01 ha (9,06%)
5. Lain-lain : 482,70 ha (4,84%)

Jumlah penduduk 27.825 jiwa dengan perincian tiap desa seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Perincian Jumlah Penduduk di Tiap Desa

NO	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Girikarto	1.913	1.943	3.856
2	Girisekar	3.545	3.738	7.283
3	Girimulyo	2.668	2.779	5.447
4	Giriwungu	1.146	1.236	2.382
5	Girisuko	2.564	2.868	5.425
6	Giriharjo	1.674	1.751	3.425
	Jumlah	13.510	14.315	27.825

propinsi DIY, dengan jumlah penduduk 759.859 jiwa, dengan komposisi penduduk 48,9 % laki-laki dan 51,1 % perempuan (Gunungkidul dalam Angka Tahun 2005), dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Klaten dan Sukoharjo, sebelah Selatan Samudera Indonesia, sebelah Barat Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dan sebelah Timur Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa dan 1.430 padukuhan.

Topografi Gunungkidul bergelombang, semua wilayahnya berada di atas pegunungan kapur kawasan Pegunungan Seribu yang membentang dari Gunungkidul Studi Penanggulangan Kemiskinan Gunungkidul 6 Samudera Indonesi hingga ujung utara wilayahnya dengan ketinggian 0-800 mdpl. Luas wilayah dan sangat beragamnya kondisi geografis menyebabkan permasalahan kemiskinan di Gunungkidul menjadi spesifik. Sampai saat ini Gunungkidul masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk dan keluarga yang masuk dalam kategori miskin masih cukup tinggi. Selain itu, kemiskinan bisa dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gunungkidul tahun 2006 yang hanya sebesar 69, 5.

Girikarto dengan jumlah penduduk sekitar 3850 atau 870 KK ini adalah satu dari 6 desa di kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 8 pedukuhan, yang 3 diantaranya yakni dukuh Wiloso, Bedug dan Pundungdigunakan sebagai lokasi penelitian oleh karena memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Secara umum Girikarto sebagaimana wilayah pedukuhan lain di Kecamatan Panggang memiliki karakteristik penduduknya yang sebagian besar adalah pertanian khususnya berlahan kering atau tadah hujan. Asumsinya ke tiga pedukuhan yang relatif paling dekat dengan pantai pesisir selatan cenderung bermatapencarian dari kekayaan laut yang ada di sekitarnya, namun ternyata asumsi tersebut tidak benar. Justru warga masyarakatnya lebih banyak yang bermatapencarian dari pertanian, peternak dan usaha kecil. Sementara warga masyarakat yang tertarik untuk menekuni bidang kenalayanan tidaklah banyak, hal ini diperoleh data bahwa

justru penduduk pendatanglah yang melakukan kegiatan usahanya sebagai nelayan.

Tanah pertanian di Girikarto yang berlahan kering dengan sistem tadah hujan relatif luas karena sebagian besar penduduk justru adalah petani pemilik tanah sekitar 3089 sementara hanya sekitar 10 % dari jumlah tersebut adalah petani penggarap tanah, penyekap dan buruh tani. Bila dilihat dari monografi desa Girikarto, penduduk masyarakat ini memiliki mata pencaharian yang sangat bervariasi, akan tetapi peternak sapi, kambing, domba atau kerbau tampaknya menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melakukan deversifikasi terutama bila menghadapi ketidakpastian musim, kekeringan, atau bahkan air laut pasang yang sering merusak tanah pertanian penduduk.

Untuk menuju wilayah Girikarto yang sebenarnya terletak wilayah paling selatan dari kecamatan Panggang ini cukup jauh dari pusat kota kecamatan, bahkan jalan desa menuju ke beberapa pedukuhan tampak tidak terpelihara, selain berbatuan juga rusak di bagian badan jalan. Keadaan ini semakin diperparah oleh curamnya kanan kiri badan jalan yang beupa jurang-jurang. Meskipun demikian, tanah-tanah pertanian oleh penduduk relatif tidak dibiarkan poso, terbukti di setiap tanah yang ada ditanami dengan tanaman-tanaman keras, atau tumpangsari yang oleh penduduk digunakan untuk mengantisipasi datangnya musim kekeringan atau bahkan hujan yang terkadang juga menggenangi tanah-tanah pertanian dan merusak tanaman penduduk, misalnya ketela pohon, padi atau kacang-kacangan. Oleh karena letak wilayah desa yang cukup jauh dari pusat kota kecamatan atau bahkan hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa Girikarto termasuk wilayah yang terisolir ini berakibat pada terjadinya kemiskinan.

Sementara itu, masyarakat miskin di kawasan pesisir seperti Girikartor menghadapi permasalahan khusus. Penduduk di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatn sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung pada musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu

bekerja sebagai nelayan kecil dengan peralatan yang sederhana, sebagai buruh nelayan, pengolah dan pedagang ikan skala kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil pula. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan nelayan pendatang yang berasal dari daerah lain yang umumnya lebih berpengalaman dan berani melaut.

Faktor lain adalah besarnya ombak laut selatan membuat nelayan lokal yang sebagian besar menggunakan perahu motor tempel kesulitan melaut setiap saat. Hasil tangkapan yang kecil sekaligus juga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Di samping itu, pola usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit keluar dari jerat kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan menyebabkan terjadinya pewarisan kemiskinan antar-generasi. Masalah kemiskinan di Gunungkidul juga terkait dengan keterisolasian wilayah.

Program-program pemberdayaan masyarakat pada desa Girikarto bukannya tidak pernah dilakukan, bahkan hingga pada bentuk-bentuk pelatihan juga pernah diselenggarakan di wilayah ini namun sebagian program pemberdayaan (khususnya PNPM tahun 2008) masih berorientasi pada pembangunan fisik, sementara pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan sumber daya manusia masih memerlukan pengembangan lebih banyak. Bila dilihat dari data kependudukan, penduduk yang melakukan kegiatan usaha kecil juga tidak menonjol jumlahnya, bukan karena kurangnya keterampilan dalam melakukan kegiatan usaha namun karena rendahnya daya beli masyarakat di sekitarnya. Keadaan ini semakin diperparah oleh etos kerja masyarakat yang rendah. Etos kerja menjadi salah satu penyebab ketidakberdayaan hingga terjadinya fenomena kemiskinan.

Berkaitan dengan rencana pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang usaha kecil, pendidikan kewirausahaan nampaknya menjadi pilihan bagi masyarakat untuk kembali meningkatkan etos kerja yang semakin tidak

tampak dalam *strategy of survival* masyarakat desa yang diklasifikasi sebagai desa miskin dan tertinggal ini. Melalui penelitian ini peningkatan etos kerja khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui berwirausaha ini menjadi fokus dalam penelitian dengan pendekatan *research and development*. Salah satu alasannya adalah bahwa desa Girikarto dengan 3 pedukuhan yang dipilih dalam setting penelitian ini dari hasil wawancara dan FGD memiliki kecenderungan untuk berkembang meskipun tanah pertanian sebagian besar adalah lahan kering. Alasan lain meski penduduk masyarakat ketiga pedukuhan ini relatif miskin tetapi pada umumnya pernah memiliki keterampilan berwirausaha meski masih memerlukan campur tangan pihak lain untuk kembali membangkitkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum memberdayakan masyarakat miskin di wilayah pesisir selatan DIY khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Propinsi DIY dan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) DIY memberikan bantuan berupa kapal kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube FM) di beberapa desa yang berada di wilayah pesisir selatan. Tampaknya pembentukan Kube semacam itu tidak terbentuk di Girikarto oleh karena mata pencaharian di Girikarto justru sebagian besar bukan di bidang kelautan atau nelayan melainkan lebih banyak bidang pertanian dan peternakan yang menjadi prioritasnya. Selain karena kenelayanan lebih banyak diminati oleh penduduk yang berasal dari Girikarto juga tingkat kecuraman pantai dan tingginya resiko jika melakukan pekerjaan sebagai nelayan adalah alasan tidak menariknya mata pencaharian yang berhubungan dengan kelautan.

## **2. Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul**

Poncosari adalah sebuah desa yang paling dekat dengan pantai di pesisir selatan, dibanding dengan desa Tirtosari salah satu dari 2 desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Srandakan. Poncosari memiliki perbedaan dengan desa Tirtosari yang lebih bercorak pada perdagangan karena memiliki potensi di bidang itu setelah adanya jalan lingkar selatan yang memang dibangun untuk membuka wilayah agar berkembang secara sosial ekonomi. Tirtosari memiliki

21 pedukuhan sementara Poncosari terdiri dari 19 pedukuhan dengan 3 pedukuhan yang secara geografis paling dekat dengan pantai pesisir selatan yaitu dukuh Kowaru, dukuh Cangkring dan dukuh Bolang.

Menurut data kependudukan, Poncosari bukanlah termasuk desa miskin, bahkan di kowaru dan kedua pedukuhan lain memiliki kakayaan alam yang cukup potensial untuk berkembang. Kowaru adalah salah satunya, selain terkenal dengan pantai dibawah pohon cemaranya juga berkembang pula usaha-usaha produktif yang berkaitan dengan kekayaan lautnya. Sementara dua pedukuhan lain memiliki potensi usaha kecil atau home industri oleh banyak rumah tangga di wilayah kedua pedukuhan tersebut. Tiga pedukuhan dengan sekitar 1332 penduduk atau sekitar 347 KK ini berpenduduk yang sebagian besar adalah petani. Tampaknya pertanian masih merupakan tumpuan hidup sebagian besar penduduknya meskipun saat ini usaha untuk melakukan diversifikasi tanaman keras sekaligus sebagai konservasi laut agar tidak terjadi abrasi atau tanaman cemara sebagai pelindung bagi pengunjung wisata pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitarnya untuk membuka peluang usaha di sekitar pantai, mengingat pariwisata beberap tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara umum fasilitas infrastruktur untuk menuju desa wisata inipun mengalami perkembangan sehingga masyarakat ini menjadi semakin terbuka, dan dengan terbukanya akses ke desa berarti membuka kesempatan masyarakat untuk membuka peluang usaha kecil dan juga industri di ketiga pedukuhan tersebut.

Untuk menuju Desa Poncosari tidaklah sulit oleh karena sekarang ini semakin banyak kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah desa yang cenderung menjadi desa wisata. Meskipun belum berkembang dengan maksimal namun secara umum, Poncosari juga menjadi desa yang dipandang mampu mengembangkan diri dengan investasi dari pihak lain selain pemerintah kabupaten setempat. Karena keadaan ini pula Kecamatan Srandakan khususnya desa Poncosari saat ini tidak melaksanakan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) karena secara fisik,

desa ini tidak begitu memerlukan pemberdayaan masyarakat khususnya kebutuhan pembangunan secara fisik.

Apabila dikaitkan dengan pengembangan wilayah pada tahun 2008 Kabupaten Bantul melaksanakan PNPM dengan menetapkan beberapa kebijakan antara lain yang menegaskan bahwa PNPM yakni: yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong *akselerasi* penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan tersebut menjadi relevan terutama kondisi-kondisi sebelumnya adalah menjadi salah satu pertimbangan. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan Unit Pemberdayaan Kabupaten diperoleh penjelasan bahwa PNPM serta program-program pemberdayaan lain yang berasal dari perorangan, kelompok swasta bahkan dari pihak asing menjadi pola pemberdayaan yang terpadu dengan program-program nasional lain. Hal ini terjadi oleh karena Kabupaten Bantul Pada Mei 2006 menghadapi bencana alam yang mengakibatkan semua pihak merasa ikut bertanggung jawab atas pemulihan wilayah Bantul dan sekitarnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2008, PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM ini diperluas melibatkan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), serta diperkuat oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh departemen sektor.

PNPM merupakan Integrasi dan Perluasan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah dan sedang berjalan. Integrasi dilakukan dengan menggabungkan program yang telah terbukti efektif, yaitu: PPK di wilayah perdesaan dan P2KP di wilayah perkotaan. Menurut data PNPM tahun 2008, beberapa kecamatan seperti *Dlingo, Piyungan, Pajangan, Kretek dan Imogiri* adalah menjadi kecamatan yang melaksanakan PNPM terutama yang berkaitan dengan pengembangan fisik atau infrastruktur. Hal ini dapat dipahami oleh karena itu kecamatan-kecamatan di bagian timur (tenggara) sebagaimana telah disebutkan sebagai

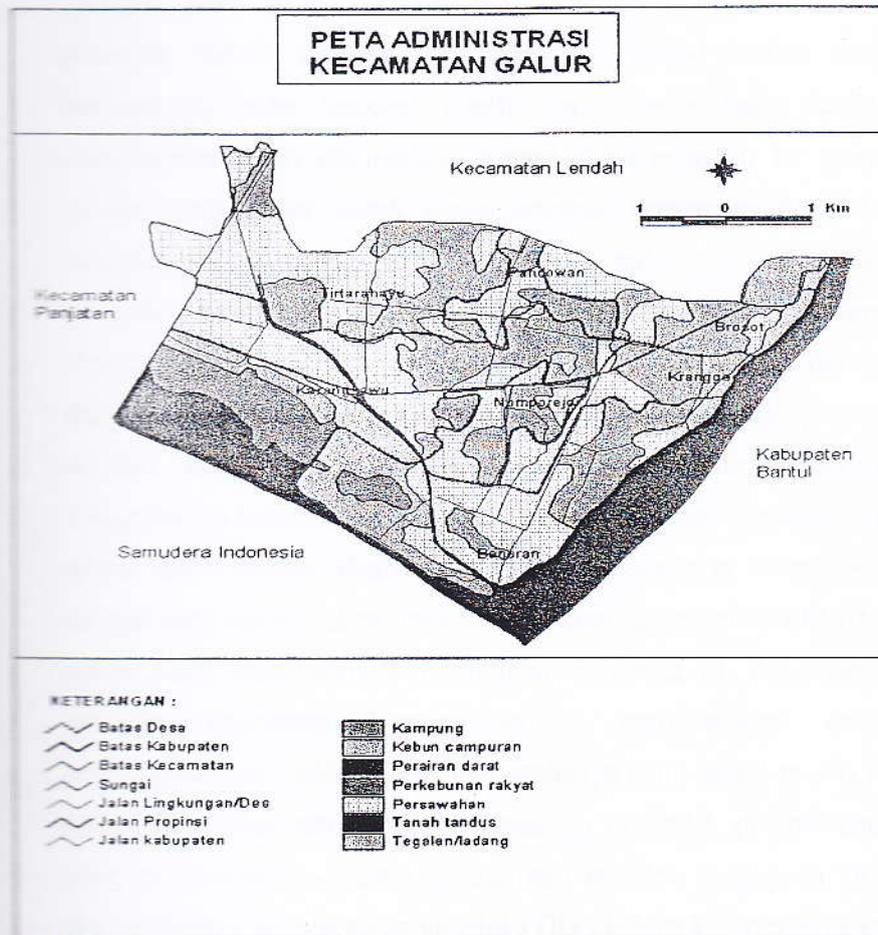
wilayah yang paling menderita dampak terjadinya gempa bumi tahun 2006. Sementara itu Kecamatan Srandakan karena letaknya adalah di bagian barat dan berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo tidak banyak terjadi dampak akibat gejala alam tersebut. Kecamatan Srandakan dipandang telah memiliki kemandirian dalam pengembangan wilayahnya.

Dari hasil pengamatan, kondisi masyarakat tampak tidak menunjukkan kemiskinannya meskipun demikian potensi alam yang tinggi mampu dikembangkan sementara sumber daya manusia sebagai pemeliharanya belum mampu menjawab tantangan dan kesempatan tersebut. Perilaku sosial ekonomi desa Poncosari saat penelitian ini berlangsung baik di bidang pertanian, usaha kelautan (pasar ikan dan rumah makan) di sekitar pantai pesisir selatan ini secara lahiriah nampak sebagai bagian dinamika kehidupan masyarakat yang sebenarnya masih cenderung di bidang pertanian. Sebagaimana desa atau pedukuhan lain, petani masih merupakan profesi yang dipertahankan oleh karena keajegan dan dipandang sudah turun temurun. Sebagian besar penduduk di desa Poncosari ini relatif berstruktur usia muda yang pada saat-saat tertentu menjadi pilihan bagi para pengembang masyarakat untuk melakukan usaha-usaha peningkatan usaha produktif.

Menurut data yang terkumpul, desa Poncosari khususnya di ketiga pedukuhan ini relatif berkembang dan sangat dekat dengan berbagai pelatihan bagi usaha peningkatan sumber daya manusianya. Persoalannya adalah kaum muda di desa ini lebih banyak melakukan usaha di luar desa atau melakukan mobilitas sosial baik belajar maupun bekerja. Dengan Kota kabupaten maupun kota Yogyakarta, desa ini relatif mudah terjangkau, sehingga wilayah ini selain terbuka juga kelompok pemuda banyak melakukan mobilitasnya.

### 3. Desa Banaran, Kecamatan Galur Kulon Progo.

Gambar 4. Peta Kecamatan Galur



Banaran adalah sebuah desa yang termasuk di wilayah kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Desa ini adalah satu dari 7 desa yang memiliki kedekatan dengan pantai pesisir selatan dibanding desa-desa lain. Desa Banaran dengan 14 pedukuhan ini berpenduduk yang sebagian besar bermatapencarian sebagai petani. Dari 14 pedukuhan, sebagaimana kriteria yang telah ditentukan sama seperti desa lain di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul dipilih 3 pedukuhan yang letaknya 2 pedukuhan paling dekat dengan pantai pesisir selatan dan 1 pedukuhan adalah di sepanjang

jalur sungai Opak yang menuju ke pantai pesisir selatan. Menurut hasil wawancara dengan para dukuh masing-masing pedukuhan memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah memiliki kekhasan yaitu sebagian besar penduduk memiliki usaha kecil yang relatif sama yaitu peternak bebek, dengan telur asinnya sebagai usaha yang cukup berkembang. Usaha tersebut relatif dapat berkembang karena secara swasembada lahan disepanjang sungai yang mengalir ke pantai pesisir selatan sangat cocok untuk usaha tersebut. Sementara itu kedua dukuh lainnya masing-masing memiliki usaha kecil di bidang kerajinan dan pertanian. Kecamatan Galur dengan Banaran termasuk didalamnya secara alam memiliki potensi wisata dan juga pasir yang cukup bermakna bagi masyarakat. Fasilitas umum di kecamatan ini cukup lengkap baik sekolah-sekolah dengan kondisi infrastruktur jalan yang sudah memadai. Sebagaimana halnya dengan desa Poncosari, keadaan penduduk di desa ini relatif maju. Namun demikian dari hasil wawancara dalam FG bersama dengan para dukuh, tokoh masyarakat, kaum muda, unsur LPMD atau BPD usaha kecil yang semula bertumbuh kembang di Poncosari, menjadi semakin berkurang karena berbagai permasalahan antara lain, ketidakmampuan dalam mengelola usahanya yang relatif masih kecil. Dari ketiga desa yang dipilih untuk penelitian diperoleh potensi dan masalah yang berbeda-beda. Adapun potensi dan masalah yang pada tabel berikut akan disajikan dikumpulkan melalui FGD (diskusi kelompok terarah) yang pertama bersama dengan kepala desa, sekretaris desa serta para kepala dukuh untuk bersama-sama memunculkan sebagai dasar pelaksanaan dan implementasi model pemberdayaan masyarakat dengan berwirausaha.

## **B. Hasil Penelitian Tentang Analisis Potensi dan Masalah**

Pada tahun pertama penelitian ini menetapkan target sebagai berikut:

1. Teridentifikasi potensi dan masalah di ke tiga Desa Penelitian

2. Teridentifikasi kebutuhan belajar masyarakat sebagai dasar implementasi model pemberdayaan masyarakat melalui berwirausaha.
3. Tersusunnya panduan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin di pesisir selatan beserta dengan materi pendidikan kewirausahaan yang akan diterapkan pada tahun penelitian yang kedua.
4. Tersusunnya draft modul pengembangan kewirausahaan yang diperuntukkan bagi pembelajaran kewirausahaan pada mahasiswa S1 sebagai produk deseminasi penelitian

Diperolehnya 5 pendamping dari masing-masing desa untuk menjadi mitra kerja penelitian khususnya untuk pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang rencananya dilakukan pada tahun kedua. Pendamping dimaksudkan sebagai bagian dari motivator terselenggaranya pendidikan kewirausahaan yang hendak diterapkan secara bertahap hingga terbentuknya kelompok-kelompok usaha sakala kecil yang berkelanjutan dan berbasis potensi masyarakat.

Keempat target untuk tahun pertama ini sampai belum seluruhnya terselesaikan. Hingga akhir bulan Agustus 2009, target pertama yakni diperolehnya identifikasi potensi dan masalah dari masing-masing desa sudah tercapai meskipun kemungkinan untuk memperdalam, memperjelas temuan di lapangan masih terbuka, mengingat beberapa hal antara lain tidak lengkapnya data-data sekunder baik dari kecamatan maupun kelurahan termasuk dari pedukuhan. Sebelum sampai pada kegiatan analisis potensi dan masalah, terlebih dahulu dilakukan penyusunan instrumen atau rambu-rambu pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Instrumen untuk menganalisis tersebut sejak awal dirancang dilakukan sedikitnya 2 kali yaitu:

1. Dilakukan FGD bersama kepala desa, kepala dukuh, tokoh masyarakat (pemuda, PKK atau tokoh masyarakat lain), BPD dan LPMD. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat semakin

lengkap, terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Alasannya adalah bahwa baik BPD, LPMP dan juga tokoh masyarakat termasuk kepala dukuh dipandang memiliki kemampuan dalam memahami masyarakat yang bersangkutan serta memiliki cakrawala berpikir yang lebih baik.

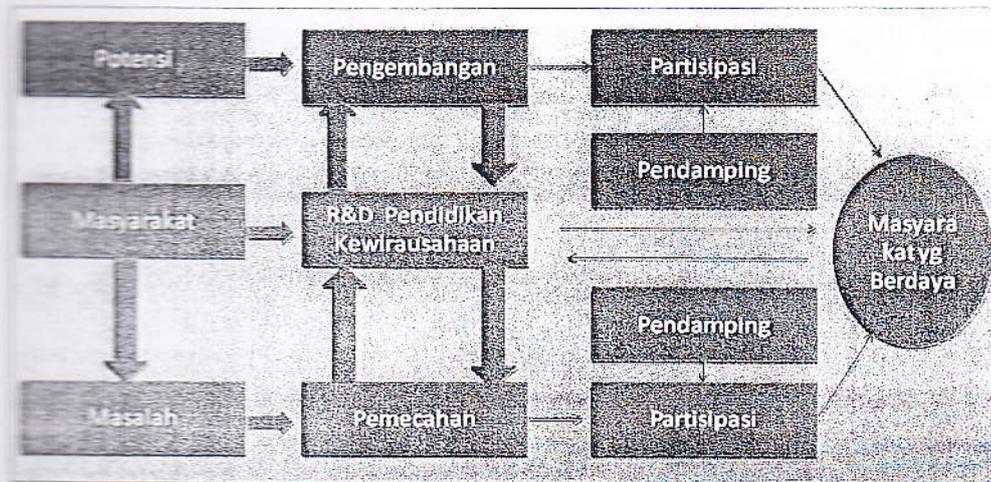
2. FGD dilakukan bersama kepala dukuh yang ditetapkan sebagai daerah penelitian dan rencana implementasi model pemberdayaan dengan berwirausaha dengan warga masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan-kemampuan awal di bidang usaha (kecil) namun berminat untuk melanjutkan usaha produkfinya namun terhalan oleh berbagai faktor.

Adapun analisis potensi masyarakat yang digali dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk upaya-upaya pengembangan sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni *research and development*. Sementara itu analisis masalah menjadi pilihan lain untuk mencari solusi (pemecahan) agar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dapat terarah utamanya dengan melakukan pendidikan kewirausahaan, sebuah pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada praksis pendidikan luar sekolah pada khususnya.

Dengan langkah-langkah yang dipersyaratkan dalam *Research and development*, implementasi pemberdayaan melalui kegiatan berwirausaha diperlukan padoman yang mengarah pada kekahasan dan keteraturan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan. Sebagai pelengkap dalam implementasi pelatihan atau pendidikan kewirausahaan, pendamping sangat diperlukan sebagai mitra dalam upaya keberlangsungan dari usaha pemberdayaan masyarakat atau pada pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang di pilih sebagai hasil FGD. Namun semua tahapan atau langkah dalam penelitian ini akan berhasil dengan baik apabila keterlibatan atau partisipasi seluruh komponen yang ada dalam masyarakat tersebut direalisasikan sehingga masyarakat yang berdaya sebagaimana yang diharapkan dapat

terwujud. Adapun secara skematik langkah-langkah atau strategi untuk mencapai target pada tahun pertama ini dapat ditunjukkan pada alur di bawah ini.

Gambar 5. Skematik langkah-langkah atau strategi



Analisis potensi dan masalah menjadi langkah awal untuk memperoleh gambaran masyarakat pesisir selatan khususnya dalam kaitannya dengan implementasi model pemberdayaan masyarakat melalui berwirausaha. Analisis potensi dan masalah ini masing-masing digunakan untuk membantu mengembangkan potensi baik alam maupun sumber daya manusia sebagian bagian dari proses rencana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. Konsep pemberdayaan masyarakat selain merupakan konsep pemberdayaan ekonomi yang juga merangkum nilai-nilai sosial budaya. Artinya bahwa untuk melakukan usaha kecil selain diperlukan kerja keras juga pengembangan kesadaran akan pentingnya tingginya jiwa wirausaha dan itu semua dapat diperoleh bila kepada masyarakat diberikan pendidikan kewirausahaan agar keberlangsungan usaha kecil yang sudah dikembangkan menjadi semakin berkembang.

Sementara itu masalah-masalah yang juga ditemukan melalui FGD ini dilakukan melalui dua tahap yaitu 1) FGD bersama dengan para

pamong pemerintahan desa seperti kepala desa, para dukuh dan tokoh masyarakat; ke 2) dilakukan melalui laporan oleh kepala dukuh dengan menggunakan angket yang kemudian ditulis sesuai dengan keadaan sebenarnya ditambah dengan melakukan wawancara bersama masyarakat yang dipandang memiliki potensi untuk terlibat secara aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan harapan tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian.

Dari identifikasi potensi dan masalah pada masing-masing desa khususnya di pedukuhan ditemukan beberapa analisis dari 2 – 3 kali pertemuan dengan rangkuman sebagai berikut:

Tabel 4. Potensi dan Temuan Masalah

Desa	Potensi yang dapat dikembangkan	Masalah yang ditemukan
<i>Girikerto, Kecamatan Panggung Kabupaten Gunung Kidul</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapatnya kegiatan usaha skala kecil yang banyak dijumpai, misalnya usaha emping mlinjo, industri makanan kecil yang dapat dipasarkan.</li> <li>2. Memiliki sifat gotongroyong dalam memecahkan masalah dapat ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga usaha ekonomi kecil yang dikoordinasi oleh kelompok-kelompok koperasi</li> <li>3. Kehendak yang kuat untuk mengembangkan usaha peternakan (sapi), sebuah usaha yang sudah dimulai oleh sekelompok warga dan saat ini memiliki prospek yang tinggi, apalagi ternak sapi dari Gunung Kidul dipandang memiliki kualitas yang baik. Peternakan sapi ini pula yang diharapkan warga Girikerto agar dapat berkembang melalui penelitian ini.</li> <li>4. Pengalaman mengikuti pelatihan keterampilan jenis usaha tertentu. Jenis – jenis pelatihan sudah beberapa kali diberikan, namun yang paling penting bagi mereka adalah pengembangan jiwa kewirausahaan dan manajemen usaha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daya beli masyarakat rendah</li> <li>2. Kemampuan manajemen usaha rendah</li> <li>3. Etos kerja (kultur) yang kurang mendukung.</li> <li>4. SDM yang rendah</li> </ol>

Poncosari  
Kecamatan  
Srandakan  
Kabupaten  
Bantul

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki potensi alam khususnya pantai pesisir selatan. Kondisi ini semakin dikuatkan dengan adanya pembenahan-pembenahan pantai sehingga dua tahun terakhir ini menjadi wisata pantai yang semakin banyak diminati masyarakat baik dari luar maupun dari desa sekitar. Beberapa perguruan tinggi atau lembaga swasta telah memanfaatkan pantai di poncosari ini untuk berbagai ajang pelatihan bahkan pantainya dimanfaatkan untuk kegiatan lomba-lomba tertentu untuk menarik minat pengunjung. Dengan melibatkan mahasiswa, UGM menggunakan pantai dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian pada masyarakat untuk tujuan pemberdayaan masyarakat miskin khususnya yang hendak mengembangkan pesisir selatan sebagai masyarakat yang berdaya.</li> <li>2. Masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan keterampilan berwirausaha oleh lembaga-lembaga pengabdian.</li> <li>3. Dukungan tokoh-tokoh informal, misalnya pak dukuh tinggi.</li> <li>4. Secara kelembagaan masyarakat desa ini didukung oleh berbagai kebijakan yang sangat otonom.</li> <li>5. Mudahnya masyarakat dalam menerima gagasan baru selama hal itu dipercaya dapat mengembangkan motivasi berusaha. (mau berubah)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pengetahuan dan informasi masyarakat.</li> <li>2. Rendahnya kemampuan mengembangkan usaha (rendahnya kemampuan manajemen usaha).</li> <li>3. Terbiasanya masyarakat menerima berbagai macam program pemberdayaan sehingga mengurangi kreatifitas dan etos kerja.</li> <li>4. Kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk unit usaha produktif.</li> <li>5. Kemampuan dalam pemasaran setelah produksi dicapai.</li> </ol> |
|--|---|

<p><i>Banaran, Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi lahan di sepanjang sungai untuk kegiatan usaha ternak bebek petelur, karena beberapa tahun yang lalu sebelum banjir wilayah pesisir di sekitar muara sungai (pertemuan antara sungai)</li> <li>2. Kegiatan usaha kecil sudah berkembang, akan tetapi bagi masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif selain mentalitas yang masih kecil juga</li> <li>3. Masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan usaha produktif</li> <li>4. Unsur kelembagaan masyarakat yang mendukung</li> <li>5. Pengalaman memperoleh pelatihan dengan jenis keterampilan usaha yang pernah diselenggarakan pelatihan beternak belut serta pelatihan keterampilan pembuatan makanan kecil dengan menggunakan bahan-bahan dari desa setempat</li> <li>6. Deversifikasi usaha yang dilakukan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketergantungan terhadap pihak pemberdayaan masyarakat baik swasta maupun pemerintah.</li> <li>2. Rendahnya sumber daya manusia</li> <li>3. Ketidakmampuan masyarakat mengembangkan keterampilan yang pernah dimiliki</li> <li>4. Etos kerja, mudah putus asa dalam melakukan kegiatan usaha</li> </ol>
--	--	--

Pada saat target tahun kedua segera direncanakan yaitu implementasi pelatihan kewirausahaan, maka juga diperlukan keterlibatan atau partisipasi semua komponen termasuk dipilihnya pendamping yang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kemauan, kerja keras serta bersedia melakukan usaha produktif baik mandiri maupun kelompok.

Dari hasil penelitian melalui wawancara, dan pengamatan terhadap perilaku usaha (kecil) masyarakat, analisis kebutuhan belajar masyarakat antar desa dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda.

Secara umum hasil identifikasi masalah dan kebutuhan pemberdayaan berbasis potensi masyarakat di wilayah pesisir menunjukkan bahwa *Pertama*, pilihan pemberdayaan melalui pendidikan bagi masyarakat miskin di pesisir selatan tampaknya memang kurang populer atau bahkan tidak terlalu menarik karena hasilnya tidak dapat segera dinikmati sebagaimana hibah-hibah *kuratif* sifatnya. Namun oleh karena terjadi dialog antar banyak pihak maka pemberdayaan yang bersifat non fisik seperti pendidikan (kewirausahaan) menjadi lebih dipahami dan bahkan menjadi pilihan terutama dalam pengembangan kewirausahaan pada unsur manajemen usaha atau setidaknya membangkitkan kembali kemampuan berwirausaha yang pernah mereka miliki sebelumnya namun tidak terolah ketika menghadapi pasang surut usaha produktif masyarakat ini.

Dari hasil wawancara melalui Forum Group Discussion (FGD) diketahui bahwa berbagai model pelatihan dan keterampilan yang menyangkut potensi sumber daya manusia maupun keterkaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam sudah cukup banyak dilaksanakan beserta peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Tidak banyak yang menunjukkan hasil secara signifikan. Langkah-langkah selanjutnya dari implementasi pelatihan dan keterampilan menurut masyarakat tidak berlangsung lama, bahkan ditinggalkan. Barangkali secara budaya, masyarakat sudah terbiasa menerima bantuan-bantuan semacam itu sehingga justru ketergantungan yang muncul dan dampak itu menjadi semakin tampak ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan persepsi masyarakat terlanjur tertuju pada bantuan-bantuan seperti biasanya saja.

*Kedua*, bila ditinjau dari karakteristik masyarakat pesisir yang sebagian besar justru lebih memilih pertanian sebagai mata pencaharian andalannya maka kiranya perlu dilakukan pendekatan-pendekatan pemberdayaan tertentu yang melibatkan warga masyarakat. Beberapa

pendekatan pola pemberdayaan yang berbasis potensi dan keterlibatan masyarakat meliputi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

Mempertimbangkan sistem mata pencaharian lain (deversifikasi); mengingat kondisi sosial ekonomi dan geografis wilayah pesisir yang dipilih sebagai seting penelitian ini memiliki kecenderungan untuk melakukan banyak pilihan untuk menunjang kehidupannya terutama apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melaut sebagaimana para nelayan.

Mempertimbangkan akses terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan optimalisasi terhadap aneka hasil bumi yang ada dengan biaya yang murah, terjangkau dan bermanfaat secara langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Mempertimbangkan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan. Pengembangan aspek solidaritas dan aksi sosial oleh karena loyalitas masyarakat terhadap nilai-nilai gotong royong cukup tinggi baik di Gunung Kidul, Bantul maupun Kulon Progo.

Untuk kebutuhan belajar masyarakat, Desa Girikarto, Kec. Panggang Gunung Kidul bersama para dukuh dan warga masyarakat dipilih untuk dilaksanakannya pendidikan kewirausahaan, hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya etos kerja, motivasi usaha, manajemen usaha hingga pemasaran dipandang penting untuk diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki minat berusaha, pernah atau sedang memiliki usaha kecil namun kurang berkembang. Di samping peningkatan kapasitas masyarakat untuk berwirausaha, kebutuhan belajar masyarakat berupa pembekalan atas jenis-jenis keterampilan khususnya yang berhubungan dengan peternakan, ternak sapi atau kambing secara kelompok.

Kebutuhan belajar masyarakat di Banaran dan Pooncosari relatif sama. Masyarakat di kedua desa ini memiliki kebutuhan belajar untuk memunculkan kesadaran untuk memiliki jiwa wirausaha (melakukan kegiatan usaha produktif dengan menggunakan kata hati) agar setiap motivasi usaha mampu berkembang sesuai harapan masyarakat. Bila ini dikembangkan maka sesuai dengan visi misi UNY yang melakukan pemberdayaan melalui pendidikan

kewirausahaan. Pendidikan dan pelatihan seperti ini memungkinkan orang untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, kemampuan mengelola (manajemen) usaha serta peningkatan etos kerja, inovatif dan kreatif dalam menghadapi dinamika usaha produktif di tengah-tengah masyarakat yang dinamis.

Salah satu alasan adalah bahwa masyarakat di kedua desa ini memiliki pengalaman yang cukup baik dalam melakukan kegiatan usaha produktif, namun saat ini kurang berkembang karena kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kegiatan ini akan terlaksana bila tersedianya draft rencana beserta materi, strategi dan pendampingan sebagaimana yang direncanakan dalam penelitian tahun ke 2.

*a. Pendamping dalam konteks pemberdayaan masyarakat*

Pada tahun pertama ini setidaknya telah ditemukan 5 orang yang akan digunakan sebagai pendamping atau mitra kerja bagi penelitian ini agar implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan dapat berjalan baik. Pendamping dalam konsep penelitian ini memiliki makna bagi keberlangsungan sebuah proses agar masyarakat menjadi maju dan berdaya. Secara konseptual, pemberdayaan dengan model pendampingan ini mencerminkan paradigma baru pemberdayaan yakni bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering* and *sustainable* (Chambers 1995). Disamping itu pendampingan memiliki sifat *enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi menjadi berkembang, *empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dan *protecting*, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

*b. Konsep Pendamping dalam beberapa hal diperlukan karena peranannya:*

Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping

bertugas menyertai proses pemberdayaan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator maupun dinamisator.

Lingkup pembinaan yang dilakukan pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas SDM serta usaha peningkatan kemampuan usaha anggota masyarakat. Oleh karena itu pendamping perlu mengenai secara baik kelompok usaha yang ada di masyarakat serta mampu melakukan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping paling efektif diambil dari anggota masyarakat yang mungkin memiliki pengetahuan, pengalaman serta kesejahteraan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat itu.

Apabila pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan adalah salah satu solusi untuk membangkitkan kembali dinamika sosial ekonomi masyarakat miskin di wilayah pesisir, maka kegiatan pemberdayaan melalui pendidikan kewirausahaan dengan bentuk pelatihan kewirausahaan yang dapat memberi arah dan motif pada kemandirian, keswadayaan masyarakat setempat. Untuk mencapai terlaksananya model pemberdayaan dengan pendidikan kewirausahaan dan terbentuknya kelompok usaha produktif dalam skala mikro maka diperlukan pendampingan yang akan membantu dan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses di lingkungannya.

Pemberdayaan melalui pendidikan kewirausahaan yang akan dilaksanakan pada tahun ke dua ini juga memerlukan penguatan kemampuan kelembagaan yang sudah ada dan yang secara tradisional justru menjadi peluang menggalang pemecahan masalah kemiskinan bersama.

*C. Panduan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Produk Model  
Pemberdayaan*

**Panduan Pemberdayaan  
Masyarakat Pesisir Selatan Yogyakarta  
Melalui Pelatihan Kewirausahaan**

**Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsurangsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang 16 – 2 menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah

penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut:

1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Secara persentase terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut, kemiskinan di luar Pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.
2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial.

Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi dalam penanganan kemiskinan. Pada saat ini masih terdapat 3,8 juta jiwa korban bencana alam, 2,5 juta jiwa orang cacat, 2,8 juta anak terlantar, 145 ribu anak jalanan, 1,5 juta penduduk lanjut usia, 64 ribu gelandangan dan pengemis, serta 66 ribu tuna susila yang membutuhkan bantuan dan jaminan sosial.

Berbagai program pembangunan baik pada skala makro hingga mikro telah diterapkan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan. Salah satu program penanggulangan kemiskinan dan juga penciptaan lapangan kerja adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat maka disusun Pedoman pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat pesisir selatan Yogyakarta. Tujuan dari Pedoman adalah sebagai salah satu sumber referensi kerangka kebijakan pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Panduan ini secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan program; prinsip dasar, pendekatan dan strategi program; komponen program; aspek-aspek pengelolaan,

monitoring dan evaluasi. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat non fisik atau melalui pendidikan kewirausahaan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam langkah-langkah pelatihan kewirausahaan tersebut.

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

### **2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

- Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam

menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

#### 5. Prinsip Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

- *Bertumpu pada pembangunan manusia.* Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- *Otonomi.* Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- *Desentralisasi.* Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- *Berorientasi pada masyarakat miskin.* Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- *Partisipasi.* Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- *Kesetaraan dan keadilan gender.* Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- *Demokratis.* Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

- *Transparansi dan Akuntabel.* Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- *Prioritas.* Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- *Kolaborasi.* Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- *Keberlanjutan.* Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- *Sederhana.* Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat

#### **6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

- Pertemuan formal dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat
- Menyepakati wilayah kerja (dusun)
- Pertemuan formal dengan masyarakat
- Pertemuan informal dengan masyarakat kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosialagama, lapangan)

#### **7. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat**

- Kesiediaan masyarakat menerima kegiatan non-fisik

- Tidak terlalu banyak kegiatan masyarakat ke proyekan lain
  - Adanya masyarakat yang terpinggirkan
  - Dukungan dari aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat
  - Lokasi terjangkau bagi tim PM, sesuai kemampuan dan sarana.
8. **Langkah-langkah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat**
- Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensi serta peluang pengembangan usaha
  - Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian
  - Melaksanakan rencana kegiatan kelompok
  - Memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus (Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (M&EP))
9. **Tujuan Pemberdayaan Dengan Pelatihan Kewirausahaan**
- a. **Tujuan Umum**
- Menyiapkan tutor dan tim pengembang yang memiliki kepedulian dalam rangka membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program kewirausahaan bagi masyarakat miskin di pesisir selatan.
- b. **Tujuan Khusus**
- a. Tim pengembang model dan tutor memahami kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin di pesisir selatan.
  - b. Tim pengembang model dan tutor menyadari dan menaruh perhatian terhadap problem yang dihadapi para pengusaha mikro di pesisir selatan (baik problem pendidikan, sosial psikologis, dan pekerjaan).
  - c. Tim pengembang dan tutor mampu mengelola dan mengembangkan program model yang telah dirintis oleh peneliti.

- d. Tim pengembang dan tutor mau dan mampu menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya lingkungan pesisir selatan, bagi kepentingan usaha mikro di pesisir selatan.
- e. Tim pengembang dan tutor mampu melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro melalui pelatihan di pesisir selatan.

#### 10. Ruang Lingkup Bahan/Materi Pelatihan

- Kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan
- Kebijakan pemerintah di bidang usaha kecil di pesisir selatan
- Tes awal materi pelatihan
- Masyarakat miskin dan masalahnya.
- Perkembangan dan model pemberdayaan dengan berwirausaha bagi masyarakat miskin.
- Intensitas pelayanan model pemberdayaan dengan berwirausaha untuk masyarakat miskin
- Konsep model pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan dengan berwirausaha dan partisipasi masyarakat.
- Aspek karakter wirausaha masyarakat miskin di pesisir selatan
- Aspek perencanaan keuangan dalam berusaha untuk masyarakat miskin di pesisir selatan
- Aspek sumberdaya dalam berusaha untuk masyarakat miskin di pesisir selatan
- Manajemen organisasi dan pengelolaan model pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan
- Perencanaan dan pengendalian keuangan
- Penggunaan sumber daya
- Tes akhir materi pelatihan
- Materi Praktek

Setiap materi yang menuntut praktek, disajikan dalam bentuk teori dan praktek, Disamping itu dilakukan praktek lapangan dalam bentuk mengimplementasikan hasil pelatihan, dalam bentuk: Pengorganisasian model, Sosialisasi program model, Program aksi model, Pratek pendampingan berwirausaha, Pencatatan dan pelaporan, Mini lokakarya (pembahasan kasus lapangan), Praktek menggerakkan masyarakat.

#### 11. Syarat Peserta Pelatihan

- Bersedia secara sukarela membantu pemerintah dalam program model pemberdayaan masyarakat miskin di pesisir selatan dengan berwirausaha.
- Mempunyai kepedulian dan minat yang besar terhadap usaha-usaha kecil di pesisir selatan.
- Bersedia mengikuti semua kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan program pengembangan model.
- Dapat membaca dan menulis, dan pendidikan sekurang-kurangnya setaraf SLTP.

## BAB VI KESIMPULAN

Menemukan model pemberdayaan yang hipotetik berdasarkan referensi dan kajian penelitian terdahulu dibangun dari sebuah proses penelitian tahun 2009 Di 3 desa masing-masing *Girikerto*, Panggang Kabupaten Guning Kidul, Desa *Poncosari*, Srandakan Kabupaten Bantul dan *Banaran*, Galur Kab. Kulon Progo ini akan diimplementasikan tahun ke dua setelah terlebih dahulu akan dibuat kurikulum pemberdayaan pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu instrumennya. Model pendidikan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan sebagai media mendorong kemampuan berwirausaha dalam skala mikro sesungguhnya sudah dimiliki sejak jauh waktu sebelumnya, namun karena pengembangan diri melalui etos kerja masyarakat tidak muncul maka kemampuan itu tidaklah terujud dalam aktivitas usaha. Model pembelajaran untuk pemberdayaan non fisik yang berupa pendidikan kewirausahaan dengan pengelolaan usaha, manajemen dan pengembangan jaringan pasar diduga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan untuk berwirausaha karena selain menggunakan sistem pendampingan juga secara kultural kolektif masyarakat memiliki loyalitas terhadap tempat tinggal dan kegotongroyongan yang relatif tinggi. Sistem pendampingan dipilih sebagai pendorong untuk masyarakat melakukan aktivitas usaha dengan menggunakan tokoh-tokoh kunci yang dianggap telah terlebih dahulu mengembangkan usaha produktif yang berbasis potensi alam sekitarnya termasuk pantai pesisir selatan diasumsikan semakin membuat model pemberdayaan non fisik yang ditemukan melalui penelitian semakin memiliki makna, manfaat dan *sustainable* bagi diri maupun lingkungan sekitarnya.

Melalui proses penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa :

(1) masyarakat di ketiga desa memiliki kesamaan dan perbedaan. *Girikerto* secara geografis lebih terpencil, tertinggal dengan penduduk yang tampak homogen dalam proses pengambilan keputusan secara patron klien, panutan dan lebih mementingkan keseragaman. Suasana FGD pun tidak variatif. Kemampuan sumber daya alam disadari masyarakat cukup memberi manfaat bagi

kehidupan terutama jika mau bekerja keras sementara etos kerja masyarakat di Girikerto belumlah optimal untuk menghadapi kondisi lahan, alam yang tampak sangat tandus di waktu kemarau dan sangat licin di waktu musim hujan bahkan dipastikan sebagian tanaman pokok tergenang air hujan. Di Desa Poncosari dan Desa Banaran, dua desa di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo yang merupakan dua wilayah pesisir selatan memiliki tipologi yang sedikit berbeda. Di Poncosari, pantai Kowaru menjadi area cukup indah dan sangat bermakna bagi masyarakat setelah beberapa tahun dikelola dengan cemara pantainya sehingga cukup menarik minat masyarakat untuk terlibat secara aktif dinamika sosial ekonomi berbasis pantai dan lingkungannya. Pesona wisata 1 tahun terakhir (yang mirip dengan kegiatan usaha hasil pengembangan ekonomi di Depok Kabupaten Bantul) menjadi pemikiran masyarakat terutama tokoh masyarakat untuk kembali mengembangkan aktivitas usaha warga terutama yang sangat memerlukan bantuan pihak lain dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan termasuk di dalamnya manajemen usaha hingga pengembangan jaringan pemasarannya. Demikian juga halnya dengan desa Banaran lebih memilih pemberdayaan non fisik sebagai instrumen pendorong kemampuan berwirausaha yang pernah dimiliki namun hilang meskipun juga berharap diselenggarakannya pelatihan keterampilan usaha berdasarkan pengalaman sebelumnya, misalnya dengan menggunakan aliran sungai yang menuju ke pantai desa banaran, masyarakat melakukan kegiatan usaha produktif telur bebek.

(2) Berdasarkan hasil analisis masalah dan potensi di ke tiga desa dengan tipologi yang berbeda namun memiliki kesamaan, sebagian besar masyarakat di sekitar pesisir selatan ini masih mengandalkan usahanya di bidang pertanian dan peternakan dibanding pemanfaatan pantai sebagai aktivitas usaha produktinya. Hal ini ditunjukkan dengan data kependudukan yang mengungkapkan bahwa sistem mata pencaharian penduduk di sekitar pantai pesisir selatan, sebagian besar adalah bertani bukan kegiatan usaha di bidang kelautan atau pantai. Dari model pemberdayaan non fisik yang ditemukan pada tahun pertama ini diharapkan dapat diimplementasikan di tahun ke dua agar mendorong masyarakat di sekitar pesisir

selatan mulai mempertimbangkan untuk membuka usaha skala mikronya melalui kegiatan usaha di pantai yang cukup menjanjikan pula.

Secara keseluruhan penelitian strategi nasional mengenai model pemberdayaan masyarakat miskin dengan berwirausaha di Daerah Pesisir Selatan Yogyakarta memiliki implikasi terhadap proses pengambilan keputusan dalam konteks pengembangan wilayah pesisir selatan yang memanfaatkan area pantai sebagai bentuk deversifikasi usaha setelah bidang pertanian. Untuk membantu masyarakat miskin di wilayah pesisir selatan melalui penelitian ini hendak dikembangkan kemampuan berwirausaha dalam skala kecil (mikro) melalui pendidikan kewirausahaan. Konsep kewirausahaan bagi masyarakat miskin di Pesisir Selatan Yogyakarta yang akan diterapkan terlebih dahulu dibuat dalam modul pembelajaran kewirausahaan dan dijabarkan ke dalam materi-materi pelatihan secara lebih sederhana disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Ashton.R. 2006. *Berwirausaha Itu Mudah, 1000 Tips Untuk Memulai dan Menumbuhkembangkan Bisnis Anda*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Biro Pusat Statistik. 2006. Berita resmi statistik tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005 – 2006 No.47/IX 1 September 2006 dari <http://www.bps.co.id>
- Borg and Gall. 1979. *Educational Research: An Introduction*. New York: Allyn and Bacon.Inc.
- BOBP (Bay of Bengal Program). 1990. *Helping Fisherfolk to help Themselves. A Study in People's Participation*. BOBP. 182.p
- Biro Pusat Statistik. 2007. Berita resmi statistik tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007 N0.38/X 2 Juli 2007 dari <http://www.bps.co.id>
- Chambers. 1983. *Rural development: putting the last first*. Longman Harlow.
- Departemen Sosial RI, (2004), *Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Potensi Sosial Masyarakat Lokal di Daerah Miskin*, Jakarta: Pusbangtansosmas
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan (2003), *Buku Pedoman Komite Penanggulangan kemiskinan*, Jakarta: Sekretariat KPK
- Moleong L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Rosdakarya. Bandung.
- Meredith. GG. 2005. *Kewirausahaan. Teori dan Praktek*. Seri Manajemen Strategis No. 1 PT Pustaka Bimanan Pressindo. Jakarta.
- Osborne, David and Gaebler.ed.2000. *Mewirausahakan Birokrasi, Reinventing Governmen. Mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik*. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

- Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. (1996). Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi, Jakarta: Centre for Strategic and Intenational Studies (CSIS).
- Suharto, Edi (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat – Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rika Aditama
- Titik Sumarti, et all. 2009. *The Model of Peasant Empowerment, toward Self-Dependent and Village*.
- Suryana. 2006. *Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sudibyakto. 2008. KR. 16-12-2008